

**PEMERINTAHAN KABUPATEN SINTANG**  
**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Jalan Pangeran Muda No. 230 Telp. (0565) 21004 -21007  
SINTANG 78611



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**  
**KABUPATEN SINTANG**  
Tahun 2023



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Sintang Tahun 2023 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat diselesaikan.

LKjIP Kabupaten Sintang Tahun 2023 merupakan indikator pencapaian kinerja yang menginformasikan mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, visi, dan misi Pemerintah Kabupaten Sintang. Pencapaian kinerja ini merupakan hasil dari kerja sama dan kerja keras semua pihak, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya.

LKjIP yang disusun ini merupakan laporan akhir dari implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026. Diharapkan LKjIP ini dapat dijadikan instrument evaluasi dan umpan balik (*feedback*) guna perbaikan dan perencanaan pada periode berikutnya.

Akhir kata, Pemerintah Kabupaten Sintang berharap laporan kinerja ini dapat berguna bagi berbagai pihak, guna pengelolaan dan penataan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan pembangunan dan pelayanan prima kepada masyarakat, dalam rangka pencapaian visi ***“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG YANG CERDAS, SEHAT, MAJU, RUKUN, DAN SEJAHTERA DIDUKUNG PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH PADA TAHUN 2026”***

Sintang, Maret 2024

Bupati Sintang,



dr. H. JAROT WINARNO, M.Med.PH



---

## RINGKASAN EKSEKUTIF (*Eksekutif Summary*)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kabupaten Sintang Tahun 2023 melaporkan capaian kinerja (*performance results*) sesuai dengan rencana kinerja (*performance plan*) yang merupakan jbaran tahunan dari Rencana Strategis Pembangunan Daerah dan sebagai laporan terakhir sesuai dengan RPJMD Tahun 2021-2026.

Sesuai dengan hasil perhitungan atas Akuntabilitas Kinerja terhadap 13 Sasaran Strategis dan 18 Indikator Kinerja Utama, di dapatkan hasil sebagai berikut :

### A. Kategori SANGAT BERHASIL

- 1) Rata – Rata Lama Sekolah (104,80%);
- 2) Harapan Lama Sekolah (96,55%);
- 3) Harapan Hidup Saat Lahir (102,4%);
- 4) Pengeluaran Per Kapita (106,2%);
- 5) Jumlah Konflik Antar Pemeluk Agama (100%);
- 6) Pertumbuhan Ekonomi (110,115);
- 7) Persentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan (99,43%);
- 8) Tingkat Pengangguran Terbuka (154%);
- 9) Persentase Desa Mandiri (111,88%);
- 10) Tingkat Inflasi Daerah (154,09%);
- 11) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (107,37);
- 12) Indeks Reformasi Birokrasi (100%);
- 13) Nilai Akuntabilitas Kinerja (100%);
- 14) Opini Atas Laporan Keuangan (100%);
- 15) Indeks SPBE (111%);

### B. Kategori BERHASIL

- 1) Kontribusi Sektor Pertanian dan Perikanan Terhadap PDRB (79,72%);
- 2) Gini Ratio (80,64%);

### C. Kategori CUKUP BERHASIL

- 1) -



#### D. Kategori TIDAK BERHASIL

##### 1) Indeks Infrastruktur Wilayah (n/a%);

Dari 18 indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa masih diupayakan untuk mencapai predikat sangat berhasil dan berhasil, penurunan persentase atas capaian kinerja tahun 2023 sangat dipengaruhi dengan keterbatasan anggaran serta akibat bencana alam yang sering terjadi di Kabupaten Sintang.

LKjIP Kabupaten Sintang ini menggambarkan keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2023 dan merupakan target terakhir sebagaimana yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026. Pemerintah Kabupaten Sintang telah berupaya untuk mencapai keberhasilan namun masih terdapat faktor yang menghambat tujuan.

Secara umum RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026 dapat dilaksanakan secara baik dengan memberdayakan segala aspek yang ada dalam upaya mewujudkan visi Kabupaten Sintang yaitu:

***TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG YANG CERDAS, SEHAT, MAJU, RUKUN, DAN SEJAHTERA DIDUKUNG PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH PADA TAHUN 2026.***

Oleh karena itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2026 yang disusun ini, diharapkan dapat memberikan daya guna, baik untuk peningkatan kinerja organisasi dan aparatur maupun bagi peningkatan akuntabilitas instansi dalam upaya mewujudkan “**Good Governance**” serta dapat dijadikan bahan masukan untuk penetapan perencanaan pembangunan selanjutnya.



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Kabupaten Sintang	1
1. Pendahuluan	1
2. Susunan Organisasi Perangkat Daerah	11
3. Sumber Daya Aparatur	14
4. Sumber Daya Keuangan	14
B. Permasalahan Utama ( <i>Strategic Issue</i> )	15
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	18
A. RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026	18
1. Visi	20
2. Misi	21
3. Tujuan dan Sasaran	22
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	25
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	27
A. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sintang	27
B. Realisasi Anggaran	110
BAB IV : PENUTUP	115
LAMPIRAN 1 : Perjanjian Kinerja	
LAMPIRAN 2 : Pengukuran Kinerja	



## DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Luas Wilayah Kabupaten Sintang Menurut Ketinggiannya	5
Tabel I.2	Cakupan Wilayah dan Luasan DAS Kabupaten Sintang	7
Tabel I.3	Profil Sungai di Kabupaten Sintang	9
Tabel I.4	Kondisi Penggunaan Lahan di Kabupaten Sintang	11
Tabel I.5	Kecamatan terdiri atas 14 Kecamatan	13
Tabel I.6	Kelurahan terdiri atas 16 Kelurahan	14
Tabel I.7	Ringkasan APBD Kabupaten Sintang 2023	15
Tabel II.1	Perjanjian Kinerja Kabupaten Sintang Tahun 2023	24
Tabel III.1	Capaian Kinerja Sasaran	29
Tabel III.2	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Indikator Pencapaian Sasaran 1	30
Tabel III.3	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1 dengan kondisi awal dan target akhir RPJMD	31
Tabel III.4	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1 dengan Target Akhir RPJMD	33
Tabel III.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1 dengan Target RPJMD	34
Tabel III.6	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	36
Tabel III.7	Indikator Pencapaian Sasaran 2	37
Tabel III.8	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 2 dengan kondisi awal dan realisasi tahun 2022 serta tahun 2021	38
Tabel III.9	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 2 dengan Target Akhir RPJMD	38
Tabel III.10	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 2 dengan Target RPJMD	39
Tabel III.11	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	40
Tabel III.12	Indikator Pencapaian Sasaran 3	42



---

Tabel III.13 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 3 dengan kondisi awal, realisasi tahun 2022, dan realisasi 2021	43
Tabel III.14 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 3 dengan Target Akhir RPJMD	43
Tabel III.15 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 3 dengan Target RPJMD	44
Tabel III.16 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	45
Tabel III.17 Indikator Pencapaian Sasaran 4	46
Tabel III.18 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 4 dengan kondisi awal realisasi tahun 2023, tahun 2022 dan 2021	47
Tabel III.19 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 4 dengan Target Akhir RPJMD	47
Tabel III.20 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 4 dengan Target RPJMD	48
Tabel III.21 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	49
Tabel III.22 Indikator Pencapaian Sasaran 5	51
Tabel III.23 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 5 dengan kondisi awal, realisasi tahun 2021 dan tahun 2022	51
Tabel III.24 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 5 dengan Target Akhir RPJMD	52
Tabel III.25 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 5 dengan Target RPJMD	53
Tabel III.26 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 4 dengan Target RPJMD	55
Tabel III.27 Indikator Pencapaian Sasaran 6	57
Tabel III.28 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 6 dengan kondisi Awal, realisasi tahun 2022 dan tahun 2021 serta target awal RPJMD	58
Tabel III.29 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 6 dengan Target Akhir RPJMD	59



---

Tabel III.30 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 6 dengan Target RPJMD	59
Tabel III.31 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	63
Tabel III.32 Indikator Pencapaian Sasaran 7	66
Tabel III.33 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 7 dengan kondisi Awal, realisasi tahun 2021, 2022 dan 2023	66
Tabel III.34 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 7 dengan Target Akhir RPJMD	67
Tabel III.35 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 7 dengan Target RPJMD	67
Tabel III.36 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	68
Tabel III.37 Indikator Pencapaian Sasaran 8	69
Tabel III.38 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 8 dengan kondisi awal, realisasi tahun 2023, Tahun 2022 dan tahun 2021	70
Tabel III.39 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 8 dengan Target Akhir RPJMD	71
Tabel III.40 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 8 dengan Target RPJMD	71
Tabel III.41 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	73
Tabel III.42 Indikator Pencapaian Sasaran 9	74
Tabel III.43 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 9 dengan kondisi awal, realisasi tahun 2022 dan tahun 2021	75
Tabel III.44 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 9 dengan Target Akhir RPJMD	75
Tabel III.45 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 9 dengan Target RPJMD	76
Tabel III.46 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	78
Tabel III.47 Indikator Pencapaian Sasaran 10	81
Tabel III.48 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 10 dengan kondisi Awal, realisasi tahun 2022 dan tahun 2021	81





---

Tabel III.49 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 10 dengan Target Akhir RPJMD	82
Tabel III.50 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 10 dengan Target Nasional	82
Tabel III.51 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	83
Tabel III.52 Indikator Pencapaian Sasaran 11	85
Tabel III.53 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 11 dengan kondisi Awal, realisasai tahun 2022 dan tahun 2021	85
Tabel III.54 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 11 dengan Target Akhir RPJMD	86
Tabel III.55 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 11 dengan Target Nasional	86
Tabel III.56 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	87
Tabel III.57 Indikator Pencapaian Sasaran 12	90
Tabel III.58 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 12 dengan kondisi Awal, realisasi tahun 2023, tahun 2022 dan tahun 2021 serta target akhir RPJMD	90
Tabel III.59 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 12 dengan Target Akhir RPJMD	91
Tabel III.60 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 12 dengan Target Nasional	91
Tabel III.61 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	94
Tabel III.62 Indikator Pencapaian Sasaran 13	97
Tabel III.63 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 13 dengan kondisi Awal, realisasi tahun 2023, tahun 2022 dan tahun 2021	98
Tabel III.64 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 13 dengan Target Akhir RPJMD	100
Tabel III.65 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 13 dengan Target Nasional	100
Tabel III.66 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	106



Tabel III.67 Realisasi Pendapatan/Penerimaan	110
Tabel III.68 Belanja Daerah	111
Tabel III.69 Realisasi Belanja Program Prioritas Daerah	112



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Luas Wilayah Kabupaten Sintang Per Kecamatan

3



---

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Gambaran Umum Kabupaten Sintang

#### 1. Pendahuluan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Sintang Tahun 2023 berdasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP ini merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematis. LKjIP Kabupaten Sintang tahun 2023 merupakan Laporan yang telah mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang periode 2021-2026.

Laporan kinerja ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja pemerintah Kabupaten Sintang dalam tahun anggaran 2023 yang dikaitkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 serta perbaikan dan penguatan SAKIP Kabupaten Sintang melalui perubahan sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana yang telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati Sintang Nomor 266 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sintang 2021-2026.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP ini diantaranya adalah untuk dapat memberikan dayaguna, baik untuk peningkatan kinerja organisasi dan



aparatur maupun peningkatan akuntabilitas Instansi Pemerintah Kabupaten Sintang dalam upaya mewujudkan **“Good Governance”**.

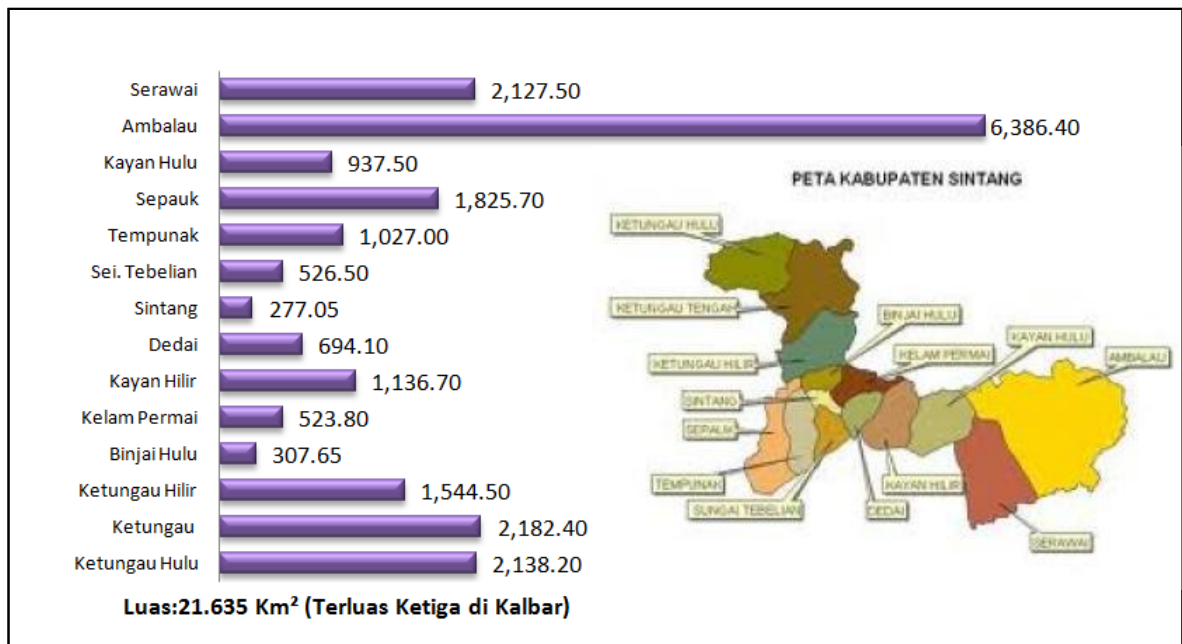
Sedangkan manfaat yang diharapkan dari LKjIP ini adalah untuk mendapatkan masukan atau kritikan serta umpan balik dari berbagai pihak, sehingga masukan tersebut menjadi motivasi kinerja bagi Pemerintah Kabupaten Sintang untuk berbuat lebih optimal dalam mewujudkan pembangunan di segala bidang.

## **1.1. Aspek Geografi dan Demografi**

### **1.1.1. Luas Wilayah dan Batas Administrasi**

Kabupaten Sintang merupakan Kabupaten yang memiliki luas wilayah ketiga terbesar di Provinsi Kalimantan Barat setelah kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kapuas Hulu. Luas wilayah Kabupaten Sintang yaitu 21.635 km<sup>2</sup>. Jarak antara Kabupaten Sintang dengan Ibukota Provinsi yaitu 395 km<sup>2</sup>. Secara administratif, wilayah Kabupaten Sintang terbagi menjadi 14 Kecamatan, 16 Kelurahan dan 391 Desa. Kecamatan-Kecamatannya adalah: Ambalau, Binjai Hulu, Dedai, Kayan Hilir, Kayan Hulu, Kelam Permai, Ketungau Hilir, Ketungau Hulu, Ketungau Tengah, Sungai Tebelian, Sepauk, Serawai, Tempunak dan Sintang. Kecamatan Ketungau Hulu dan Ketungau Tengah berbatasan langsung dengan Negara Malaysia.

Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Ambalau dengan luas 6.386,40 Km<sup>2</sup> (29,52%) dari luas Kabupaten Sintang. Sedangkan luas masing-masing Kecamatan lainnya hanya berkisar 1–29 persen dari luas Kabupaten Sintang. Adapun Kecamatan terkecil wilayahnya adalah Sintang, seluas 277,05Km<sup>2</sup> (1,28%). Gambaran luas wilayah di Kabupaten Sintang dapat dilihat pada Gambar 2.1. di bawah ini. Beberapa hal yang patut diperhatikan dalam hal pemetaan luas wilayah Kecamatan, pertama ketimpangan luas wilayah, meskipun sebagian besar wilayah Kecamatan memiliki luas yang relatif seimbang, namun terdapat satu kecamatan, yaitu Kecamatan Ambalau yang memiliki area yang terlalu luas.



Gambar 1.1. Luas wilayah Kabupaten Sintang Per Kecamatan

Keadaan ini relatif menyulitkan masyarakatnya untuk mendapatkan akses pembangunan yang lebih mudah dan murah. Kedua, masalah perbatasan antar negara, di mana terdapat dua Kecamatan yaitu Kecamatan Ketungau Tengah dan Ketungau Hulu, yang berbatasan langsung dengan Sarawak Malaysia. Terdapat dua tantangan yang kadang-kadang dilematis untuk disikapi. Tantangan pertama dalam bentuk peluang pengembangan ekonomi masyarakat. Tantangan kedua dalam bentuk dampak letak akses perbatasan yang cenderung menyajikan kegiatan ekonomi yang bersifat ilegal, serta mempengaruhi kearifan budaya masyarakat tradisional.

### 1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Sintang merupakan salah satu daerah bagian timur di Provinsi Kalimantan Barat yang dilalui oleh garis Khatulistiwa dengan Ibukotanya Sintang terletak di antara 1° 05' Lintang Utara dan 0° 46' Lintang Selatan serta 110° 50' Bujur Timur dan 113° 20' Bujur Timur.



Secara geografis batas administrasi Kabupaten Sintang berbatasan dengan wilayah Kabupaten, Propinsi dan Negara Lain, yaitu :

- Utara berbatasan dengan Serawak, Malaysia Timur dan Kabupaten Kapuas Hulu.
- Selatan berbatasan dengan Kalimantan Tengah dan Kabupaten Melawi serta Kabupaten Ketapang.
- Timur berbatasan dengan Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kapuas Hulu.
- Barat berbatasan dengan Kabupaten Ketapang, Sanggau dan Sekadau.

Kabupaten Sintang merupakan salah satu Kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu Malaysia, khususnya negara bagian Serawak. Wilayah Kabupaten Sintang yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia adalah Kecamatan Ketungau Tengah dan Kecamatan Ketungau Hulu.

### **1.1.3. Topografi**

Wilayah Kabupaten Sintang merupakan daerah perbukitan dengan luas sekitar 13.573,75 km<sup>2</sup> atau sekitar 62,74 persen dari luas Kabupaten Sintang (21.635 km<sup>2</sup>). Sebagai daerah yang berhutan tropis dan memiliki kelembaban udara yang cukup tinggi, Sintang memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Intensitas curah hujan di daerah ini sebesar 249,08 milimeter perbulan dengan rata-rata hari hujan sebanyak 17 hari perbulan, tantangan berat dari kondisi topografi ini adalah bagaimana meningkatkan upaya-upaya pemanfaatan lahan hendaknya disinkronisasikan antara komoditas yang akan ditanam dengan kondisi lahan agar ekosistemnya terjaga dan produktivitasnya optimal. Kabupaten Sintang dilalui oleh dua sungai besar, yaitu Sungai Kapuas dan Sungai Melawi. Selain sungai juga terdapat empat gunung yang cukup tinggi, yaitu: Gunung Batu Raya (tinggi 2.278 m) di Kecamatan Serawai, Gunung Batu Maherabut (tinggi 1.270 m), Gunung



Batu Baluran (tinggi 1.556 m), dan Gunung Batu Sambung (tinggi 1.770) di Kecamatan Ambalau.

Kabupaten Sintang memiliki potensi alam yang dapat dijadikan objek wisata, namun hingga saat ini potensi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal. Potensi alam tersebut berupa air terjun sebanyak 19 air terjun yang tersebar di 7 Kecamatan, yaitu Sepauk, Kayan Hulu, Kayan Hilir, Serawai, Ambalau, Ketungau Tengah dan Ketungau Hulu. Kabupaten Sintang juga memiliki 4 gunung yang terdapat di Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau. Kondisi tofografi wilayah Kabupaten Sintang dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel I.1.  
Luas Wilayah Kabupaten Sintang Menurut Ketinggiannya

No.	Kecamatan	Luas (Ha)	Wilayah Datar (Ha)	Wilayah Bukit dan Gunung / (Ha)
1.	S e r a w a i	212.750	-	212.750
2.	A m b a l a u	638.640	-	638.640
3.	Kayan Hulu	93.750	29.573	64.177
4.	S e p a u k	182.570	71.936	110.634
5.	Tempunak	102.700	58.632	44.068
6.	Sungai Tebelian	52.650	49.850	2.800
7.	S i n t a n g	27.705	27.705	-
8.	D e d a i	69.410	57.792	11.618
9.	Kayan Hilir	113.670	88.838	24.832
10.	Kelam Permai	52.380	49.780	2.600
11.	Binjai Hulu	30.765	30.021	744
12.	Ketungau Hilir	154.450	127.954	26.496
13.	Ketungau Tengah	218.240	121.116	97.124
14.	Ketungau Hulu	213.820	92.928	120.892
	Kabupaten Sintang	2.163.500	806.125	1.357.375

Sumber : *Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sintang*





---

#### **1.1.4. Geologi**

Berdasarkan peta geologi, Kabupaten Sintang meliputi formasi Alat Sandstone, Alluvial Deposits, Betung Volcanics, Dangan Sandstone, Disected Alluvial Deposits, Haloq Sandstone, Ingar Formation, Kantu Formation, Ketungau Formation, Mensibau Granodiorite, Payak Formation, Pinoh Metamorphics, Reef Limestone, Sekayam Sandstone, Selangkai Group, Semitau Complex, Sepauk Tonalite, Silat Shale, Sintang Intrusives, Sukadana Granite, Talus Deposit, Tebidah Formation, Tutoop Sandstone, dan Undiff Melawi Group. Berbagai lapisan batuan yang tersebut terdapat di seluruh lapisan di wilayah Kabupaten Sintang.

Jenis batuan yang mendominasi di Kabupaten Sintang adalah Tebidah Formation seluas 410.448,58 Ha atau mencapai 18,61% dari luas wilayah Kabupaten Sintang terdapat di kecamatan-kecamatan Ambalau, Dedai, Kayan Hilir, Kayan Hulu, Sepauk, Serawai, Sintang, Sui Tebelian, dan Tempunak. Selanjutnya batuan dominan berikutnya adalah Mensibau Granodiorite yang mencapai 10,70% dari luas wilayah Kabupaten Sintang terdapat di beberapa kecamatan yaitu Kecamatan Sepauk, Kecamatan Ambalau dan Kecamatan Serawai.

Dilihat dari tekstur tanahnya, sebagian besar daerah Kabupaten Sintang terdiri dari tanah latasol meliputi areal seluas 1,02 juta hektar atau sekitar 46,99 % dari luas daerah yaitu 2,16 juta, selanjutnya tanah podsolit sekitar 0,93 juta hektar atau 42,89 % yang terhampar hampir di seluruh kecamatan sedangkan jenis tanah yang paling sedikit ditemui di Kabupaten Sintang yaitu jenis tanah organosol hanya sekitar 0,05 juta hektar atau sebesar 2,08 %.



### 1.1.5. Hidrologi

Kabupaten Sintang dilalui oleh 2 sungai besar yaitu Sungai Kapuas dan Sungai Melawi, serta dua sungai kecil yaitu Sungai Ketungau yang merupakan anak dari Sungai Kapuas dan Sungai Kayan yang merupakan anak dari Sungai Melawi. Sungai Kapuas melalui Kecamatan Ketungau Hilir, Kelam Permai, Binjai Hulu, Sintang, Tempunak sampai ke Sepauk. Sedangkan Sungai Melawi melalui Kecamatan Ambalau, Serawai, Dedai sampai ke Sintang. Sungai Kayan melalui Kecamatan Kayan Hulu sampai ke Kayan Hilir, sedangkan Sungai Ketungau melalui Kecamatan Ketungau Hulu, Ketungau Tengah sampai ke Ketungau Hilir.

Sistem hidrologi wilayah Kabupaten Sintang memiliki 8 buah DAS yang meliputi DAS Ambalau, DAS Hulu Melawi, DAS Jungkit, DAS Kayan, DAS Ketungau, DAS Lebang dan Kebiyau, DAS Melawi dan DAS Tempunak. DAS terluas adalah DAS Melawi, sedangkan DAS Jungkit merupakan DAS dengan wilayah tersempit di Kabupaten Sintang.

Luasan dan wilayah cakupan dari delapan DAS tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I.2.  
Cakupan Wilayah dan Luasan DAS Kabupaten Sintang

No	DAS	Kecamatan	Luas ( Ha )	Luas DAS ( Ha )
1	DAS Ambalau	Serawai	2.798,69	241.323,49
		Ambalau	238.524,80	
2	DAS Hulu Melawi	Serawai	1.992,94	372.901,81
		Ambalau	364.471,12	
		Kayan Hulu	6.437,75	
3	DAS Jungkit	Ketungau Tengah	18.416,01	105.287,06
		Sintang	75,57	
		Sepauk	13.776,68	
		Tempunak	241,02	
		Ketungau Hilir	65.058,76	
		Binjai Hulu	7.719,03	



No	DAS	Kecamatan	Luas ( Ha )	Luas DAS ( Ha )
4	DAS Kayan	Dedai	3.433,54	277.512,22
		Serawai	995,20	
		Ambalau	1.385,36	
		Kayan Hulu	166.504,84	
		Kayan Hilir	102.545,74	
		Kelam Permai	2.647,54	
5	DAS Ketungau	Ketungau Hulu	196.185,57	455.744,95
		Ketungau Tengah	182.717,42	
		Ketungau Hilir	76.841,96	
6	DAS Lebang dan Kebiyau	Sintang	7.735,69	110.870,66
		Dedai	686,71	
		Kelam Permai	59.369,24	
		Binjai Hulu	22.658,62	
		Ketungau Hilir	20.420,40	
7	DAS Melawi	Dedai	56.587,24	485.556,68
		Kayan Hilir	3.217,63	
		Kelam Permai	4.988,02	
		Sintang	14.616,07	
		Sui Tebelian	15.913,23	
		Sepauk	126.753,14	
		Tempunak	1.602,41	
		Serawai	249.060,02	
		Ambalau	11.092,33	
		Kayan Hulu	1.726,59	
8	DAS Tempunak	Sui Tebelian	41.579,56	157.797,68
		Tempunak	78.581,70	
		Sintang	10.846,72	
		Sepauk	15.818,77	
		Binjai Hulu	10.970,93	

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang

Kondisi hidrologi secara khusus di Kabupaten Sintang adalah dilaluinya wilayah ini oleh 2 sungai besar yaitu Sungai Kapuas dan Sungai Melawi. Sungai Kapuas melalui Kecamatan Ketungau Hilir, Kelam Permai, Binjai Hulu, Sintang, Tempunak sampai ke Sepauk. Sedangkan Sungai Melawi melalui Kecamatan Ambalau, Serawai, Dedai sampai ke Sintang. Sungai Kayan melalui Kecamatan Kayan Hulu sampai ke Kayan Hilir,



sedangkan Sungai Ketungau melalui Kecamatan Ketungau Hulu, Ketungau Tengah sampai ke Ketungau Hilir.

Beberapa sungai yang mengalir di seluruh wilayah Kabupaten Sintang memberikan jaminan ketersediaan air yang menunjang kehidupan masyarakat Kabupaten Sintang. Selain ketersediaan air permukaan yang cukup, kualitas air sungainya juga menunjukkan tidak adanya zat berbahaya, meskipun bukan merupakan kualitas yang layak dikonsumsi. Secara umum sebaran potensi hidrologis (sungai, danau, dan embung) utama di Kabupaten Sintang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel I.3.  
Profil Sungai di Kabupaten Sintang

No	Nama Sungai	Anak Sungai	Lokasi Kecamatan
1	Sungai Kapuas	Sungai Ketungau	1. Ketungau Hilir, 2. Kelam Permai, 3. Binjai Hulu, 4. Sintang, 5. Tempunak 6. Sepauk.
2	Sungai Melawi	Sungai Kayan	1. Ambalau, 2. Serawai, 3. Dedai 4. Sintang
3	Sungai Kayan		1. Kayan Hulu 2. Kayan Hilir
4	Sungai Ketungau		1. Ketungau Hulu, 2. Ketungau Tengah 3. Ketungau Hilir

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang

#### 1.1.6. Klimatologi

Kabupaten Sintang dikenal sebagai daerah penghujan dengan intensitas yang tinggi. Hal tersebut dikarenakan Kabupaten Sintang sebagian besar wilayahnya merupakan daerah perbukitan yaitu sebesar 53,50 persen. Sepanjang tahun, rata-rata curah hujan di Kabupaten Sintang sebesar 249,08 milimeter per bulan dengan rata-rata hari hujan sebanyak



17 hari per bulan. Menurut Stasiun Meteorologi Susilo Sintang, intensitas curah hujan yang cukup tinggi ini, terutama dipengaruhi oleh keadaan daerah yang berhutan tropis dan disertai dengan kelembaban udara yang cukup tinggi.

Rata-rata bulanan curah hujan tertinggi tahun terjadi pada bulan November, yaitu mencapai 388,8 milimeter dengan hari hujan sebanyak 26 hari, sedangkan rata-rata curah hujan terendah terjadi pada bulan Agustus yaitu mencapai 55,8 milimeter dengan hari hujan sebanyak 7 hari. Intensitas hujan yang tinggi biasanya mempengaruhi kecepatan angin. Faktor angin ini sangat mempengaruhi kegiatan penerbangan serta kegiatan-kegiatan lainnya.

Temperatur udara di Kabupaten Sintang setiap bulannya rata-rata berkisar antara 26,4°C sampai dengan 27,7°C di mana temperatur udara terendah sebesar 23°C dan temperatur udara tertinggi sebesar 33,4°C. Penyinaran matahari yang dicatat dari Stasiun Meteorologi Susilo Sintang berkisar antara 45,16 persen sampai dengan 84,77 persen dengan rata-rata penyinaran matahari sebesar 61,02 persen.

#### **1.1.7. Penggunaan Lahan**

Hingga tahun 2020, luas lahan yang ada di Kabupaten Sintang sebesar 2.163.500 Ha dimana luas lahan pertanian sebanyak 1.435.367 Ha dan lahan Non Pertanian sebanyak 728.133 Ha. Kondisi penggunaan lahan di Kabupaten Sintang dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel I.4.  
Kondisi Penggunaan Lahan di Kabupaten Sintang

NO.	JENIS LAHAN	LUAS LAHAN (Ha)
A.	LAHAN PERTANIAN	1.435.367
1.	Lahan Sawah (Irigasi, Tadah Hujan, Rawa Pasang Surut, Rawa Lebak)	20.138
2.	Tegal/Kebun	42.608
3.	Ladang/Huma	21.794
4.	Perkebunan	676.260
5.	Ditanami Pohon/Hutan rakyat	211.003
6.	Padang Pengembalaan/Rumput	2.232
7.	Sementara tidak diusahakan	41.291
8.	Lainnya (Tambak,kolam,empang, hutan negara, dll)	420.041
B.	LAHAN BUKAN PERTANIAN	728.133
	<b>Total Luas Wilayah</b>	<b>2.163.500</b>

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang

## 2. Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Sintang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Tugas dan Fungsi Staf Ahli, Sekretariat DPRD, 4 Badan dan 3 Lembaga Teknis, 20 Dinas termasuk Satuan Polisi Pamong Praja, 1 Kantor dan 1 RSUD, 14 Pemerintahan Kecamatan, 16 Pemerintahan Kelurahan, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Sekretariat Daerah
- 2) Tugas dan Fungsi Staf Ahli
- 3) Sekretariat DPRD
- 4) Inspektorat Daerah



---

**5) Dinas Daerah, terdiri dari:**

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang
2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupten Sintang
3. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang
4. Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang
5. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang
6. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang
7. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang
8. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang
9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang
10. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang
11. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang
12. Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang
14. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang
16. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang
17. Dinas Perhubungan Kabupaten
18. Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang
19. Dinas Sosial Kabupaten Sintang
20. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang

**6) Badan dan Lembaga Teknis, terdiri dari:**

1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang.



2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang.
3. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang
4. Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang
6. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang
7. Rumah Sakit Umum Daerah Ade M. Djoen.

**7) Kecamatan terdiri atas 14 Kecamatan, yaitu:**

Tabel I.5

No	Nama Kecamatan	Nama Ibu Kota	Luas Area (Km2)
1	Dedai	Nanga Dedai	694,10
2	Kayan Hilir	Nanga Mau	1.136,70
3	Kayan Hulu	Nanga Tebidah	937,50
4	Sintang	Sintang	277,05
5	Kelam Permai	Kebong	523,80
6	Binjai Hulu	Binjai	307,65
7	Ketungau Hilir	Nanga Ketungau	1.544,50
8	Ketungau Tengah	Nanga Merakai	2.182,40
9	Ketungau Hulu	Senaning	2.138,20
10	Serawai	Nanga Serawai	2.127,50
11	Ambalau	Nanga Kemangai	6.386,40
12	Sungai Tebelian	Sungai Ukoi	526,50
13	Tempunak	Nanga Tempunak	1.027,00
14	Sepauk	Nanga Sepauk	1.825,70
<b>Jumlah</b>			<b>21.635,00</b>





**8) Kelurahan terdiri atas 16 Kelurahan, yaitu:**

**Tabel I.6**

No	Nama Kelurahan
1	Kelurahan Akcaya
2	Kelurahan Alai
3	Kelurahan Batu Lalau
4	Kelurahan Kapuas Kanan Hilir
5	Kelurahan Kapuas Kanan Hulu
6	Kelurahan Kapuas Kiri Hilir
7	Kelurahan Kapuas Kiri Hulu
8	Kelurahan Kedabang
9	Kelurahan Ladang
10	Kelurahan Mekar Jaya
11	Kelurahan Mengkurai
12	Kelurahan Menyumbang Tengah
13	Kelurahan Rawa Mambok
14	Kelurahan Sengkuang
15	Kelurahan Tanjung Puri
16	Kelurahan Ulak Jaya

### **3. Sumber Daya Aparatur**

Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang didukung oleh sumber daya manusia sebanyak **5.129** orang PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak **972** orang (laporan per Desember 2023).

### **4. Sumber Daya Keuangan**

Ringkasan APBD Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 101 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2023.



Tabel I.7

Ringkasan APBD Kabupaten Sintang 2023

Kode Rek.	Uraian	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>1.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	179.403.714.301,00
<b>1.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	1.829.916.453.302,00
<b>1.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	4.500.000.000,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>	2.013.820.167.603,00
<b>2.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	
<b>2.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	1.374.524.123.002,00
<b>2.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	307.221.770.188,00
	<b>BELANJA TRANSFER</b>	471.961.993.328,00
	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	8.398.710.770,00
	<b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b>	2.162.106.597.288,00

## B. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUE*)

Dalam upaya menjamin terwujudnya masyarakat Kabupaten Sintang yang cerdas, sehat, maju, rukun dan sejahtera didukung penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih pada tahun 2026 dan selaras dengan RPJP Kabupaten Sintang , maka strategi pembangunan yang akan dijalankan adalah:

1. Mewujudkan perekonomian yang maju dengan mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kegiatan investasi swasta dan masyarakat, yang diorientasikan pada peningkatan kemampuan sektor ekonomi serta peningkatan kemampuan produksi pertanian dan perkebunan, sekaligus peningkatan kemampuan pengolahan hasil akhirnya.



2. Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif dan inovatif untuk meningkatkan daya saing serta penguasaan dan pemanfaatan IPTEK.
3. Mewujudkan infrastruktur dasar yang memadai guna membuka Kawasan terisolir dan tertinggal guna meningkatkan investasi di kawasan tersebut.
4. Mewujudkan kemampuan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan dengan memanfaatkan seoptimal mungkin sumberdaya alam dan memberikan perlindungan fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan, berkeadilan, dan berkeseimbangan; untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat Kabupaten Sintang.
5. Mewujudkan pembangunan wilayah yang merata dan berkeadilan dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui penataan kebijakan pembangunan pengurangan kesenjangan antar wilayah, penataan ruang wilayah dan pertanahan, percepatan pengembangan wilayah cepat tumbuh dan strategis, percepatan pembangunan wilayah tertinggal/miskin dan pembangunan wilayah perbatasan antar negara (Serawak-Malaysia Timur).
6. Mewujudkan masyarakat yang bermoral, berbudaya, dan religius, serta memiliki kultur produktif-inovatif dan mandiri berlandaskan kepada nilai-nilai luhur Pancasila, budaya bangsa, dan agama/kepercayaan.
7. Mewujudkan keamanan, ketertiban dalam masyarakat berbasis supremasi hukum dan tata pemerintahan yang baik
8. Mewujudkan budaya politik yang demokratis dan menghargai heterogenitas sosial dan politik dalam masyarakat.

Disamping strategi pembangunan sebagaimana diuraikan di atas, dalam upaya mewujudkan visi dan misi Bupati Sintang periode tahun 2021-2026 juga diperkuat dengan menetapkan penggerak utama (*prime mover*) pembangunan daerah yang terdiri dari:

1. Membangun wilayah dari pinggiran;
2. Penataan dan pemekaran wilayah;



3. Aksesibilitas terhadap sumber daya listrik dan energi lainnya serta jaringan internet;
4. Hilirisasi produk;
5. Kegawatdaruratan infrastruktur transportasi; dan
6. Tata kelola pemerintahan.



---

## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

### A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026

RPJMD Kabupaten Sintang periode 2021-2026 sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 disusun dengan maksud sebagai upaya memenuhi kebutuhan daerah terhadap suatu rencana pembangunan daerah dalam dimensi waktu lima tahun ke depan yang memberikan arah dan sekaligus pedoman kepada seluruh *stakeholders* pembangunan di Kabupaten Sintang. Disamping itu, penyusunan RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026 merupakan upaya penjabaran dari visi, misi dan program prioritas Bupati Sintang hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan langsung Tahun 2021.

Sedangkan tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Sintang periode 2021-2026 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati tersebut adalah sebagai berikut :

- a. terjabarnya visi, misi, agenda pembangunan dan program Bupati/Wakil Bupati ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang rinci, terarah, terukur, dan dapat dilaksanakan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026;
- b. menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan dana yang bersumber baik dari APBD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maupun Sumber dana lainnya;



- c. mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi, dan sinkronisasi pembangunan, baik antar OPD, maupun antar Pemerintah Kabupaten Sintang dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Pusat;
- d. tersedianya tolok ukur untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja setiap OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;
- e. terciptanya iklim pemerintahan yang aman dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
- f. mengoptimalkan kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Sintang, swasta, dan masyarakat.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang memiliki fungsi sebagai:

- a. Pedoman bagi Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) OPD;
- b. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang pada tahun 2023 ini merupakan tahun ketiga dari lima tahun RPJMD Kabupaten Sintang tahun 2021–2026;
- c. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA).



## 1. Visi

Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026, yaitu:

**“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat, Rukun, Sejahtera , Maju dan Lestari didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Dan Bersih pada Tahun 2026”**

Makna yang terkandung dalam visi tersebut, diperoleh beberapa komponen pokok adalah:

- **Cerdas** adalah keadaan dimana masyarakat memiliki keunggulan intelektual yang berdaya saing tinggi, berperadaban, profesional serta berwawasan kedepan yang luas sehingga mau dan mampu berperan secara optimal dalam kehidupan sosial.
- **Sehat** adalah keadaan dimana kondisi masyarakat, baik jasmaniah maupun rohaniah, dalam keadaan baik, dalam arti memiliki daya tahan hidup yang tinggi.
- **Rukun** merupakan suatu keadaan dalam upaya menciptakan kerukunan antar dan inter umat beragama yang berdampak kepada terciptanya proses social dan interaksi social dalam membentuk integrasi social sehingga mampu mamnyatukan berbagai lini perbedaan dalam masyarakat.
- **Sejahtera** adalah keadaan dimana kebutuhan masyarakat terpenuhi secara optimal, adil, dan merata.
- **Maju dan Lestari** adalah keadaan dimana masyarakat memiliki kondisi fisik dan non fisik yang unggul, mandiri, dan berwawasan kedepan luas dengan pemanfaatan segenap potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan, yang dilandasi kearifan dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup dan tata ruang.



- **Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih** adalah keadaan dimana pemerintah daerah menerapkan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga terwujud pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, jujur, dan bertanggung jawab.

## 2. Misi

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026 tersebut, maka misi pembangunan Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

- Misi 1 : Mewujudkan pembangunan pendidikan berkualitas dan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat.
- Misi 2 : Mewujudkan toleransi, kesetaraan, dan Kerjasama dalam kerukunan kehidupan antar dan intern umat beragama dengan tetap meningkatkan kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan sosial.
- Misi 3 : Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Misi 4 : Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah secara lestari.
- Misi 5 : Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.





---

### 3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan misi. Tujuan dan sasaran untuk masing-masing Misi sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Misi pertama, **“Mewujudkan pembangunan pendidikan berkualitas dan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat”** dengan tujuan **Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan serta pendapatan masyarakat** berupa sasaran sebagai berikut :
  - 1.1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat;
  - 1.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat;
  - 1.3. Meningkatnya Daya Beli Masyarakat;
  
2. Misi kedua, **“Mewujudkan toleransi, kesetaraan, dan Kerjasama dalam kerukunan kehidupan antar dan intern umat beragama dengan tetap meningkatkan kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan sosial”** dengan tujuan **Meningkatkan kualitas kehidupan keagamaan, toleran dalam kemajemukan masyarakat** berupa sasaran sebagai berikut :
  - 2.1. Meningkatnya kerukunan antar umat beragama;
  
3. Misi ketiga, **“Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat”** dirumuskan dengan tujuan : **a) Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan perekonomian masyarakat dan b) Meningkatnya Pemerataan Ekonomi**, berupa sasaran sebagai berikut :



- 3.1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi;
  - 3.2. Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran;
  - 3.3. Meningkatnya Desa mandiri;
  - 3.4. Meningkatnya Kontribusi sektor Pertanian dan Perkebunan terhadap PDRB;
  - 3.5. Terjaganya stabilitas perekonomian daerah;
  - 3.6. Menurunnya ketimpangan pendapatan;
4. Misi keempat, **“Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah secara lestari”** dirumuskan dengan tujuan **Meningkatan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup**, berupa sasaran sebagai berikut :
- 4.1. Meningkatnya kualitas infrastruktur Wilayah;
  - 4.2. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup;
5. Misi kelima, **“Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih”** dirumuskan dengan tujuan **Mewujudkan reformasi birokrasi di pemerintahan daerah**, berupa sasaran sebagai berikut :
- 5.1. Meningkatnya transparansi, akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan;



## B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 ini merupakan hasil perbaikan dan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Sintang yang dilakukan oleh Kementerian PANRB dan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Sintang Nomor 266 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026.

Pemerintah Kabupaten Sintang telah menyediakan dana melalui APBD tahun 2023 sebesar Rp. 1.686.409.170,00 untuk mendukung implementasi perjanjian kinerja tersebut. Adapun sasaran dan indikator kinerja beserta targetnya yang dilaksanakan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel II.1**  
**Perjanjian Kinerja Kabupaten Sintang Tahun 2023**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)		Satuan	Target
1	2	3		4	5
1.	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	1.	Rata-rata Lama Sekolah	%	7,29
		2.	Harapan Lama Sekolah	%	12,74
2.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1.	Harapan Hidup Saat Lahir	Tahun	72.31
3.	Meningkatnya daya beli masyarakat	1.	Pengeluaran perkapita	Rupiah/ Bulan	1.315. 950
4.	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	1.	Jumlah Konflik antar pemeluk agama	Kali	0
5.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	1.	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,25
6.	Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran	1.	Persentase penduduk di atas garis kemiskinan	%	92,35
		2.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,5



No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)		Satuan	Target
1	2	3		4	5
7.	Meningkatnya Desa mandiri	1.	Persentase Desa mandiri	%	25,83
8.	Meningkatnya Kontribusi sektor Pertanian dan Perkebunan terhadap PDRB	1.	Kontribusi sektor Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB (%)	%	29,59
9.	Terjaganya stabilitas perekonomian daerah	1.	Tingkat Inflasi daerah	%	4,4
10.	Menurunnya ketimpangan pendapatan	1.	Gini Ratio	%	0,25
11.	Meningkatnya kualitas infrastruktur Wilayah	1.	Indeks Infrastruktur Wilayah	%	52,5
12.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	69,15
13.	Meningkatnya transparansi, akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan	1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	B
		2.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Kategori	B
		3.	Opini atas Laporan Keuangan	Kategori	WTP
		4.	Indeks SPBE	Indeks	1.7



## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sintang

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendahnya realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcome atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang digunakan.



Untuk pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja outcome yang lebih tinggi (*ultimateoutcomes*) serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Namun demikian karena keterbatasan data sebagai akibat belum terbangunnya sistem pengumpulan data serta indikator keberhasilan kinerja tahun sebelumnya menggunakan indikator kinerja yang berbeda-beda, maka analisis lebih lanjut terhadap peningkatan dan penurunan kinerja belum dapat disajikan

Nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Range	Penilaian
85 s.d 100	Sangat Berhasil
$70 \leq x < 85$	Berhasil
$55 \leq x < 70$	Cukup Berhasil
$< 55$	Tidak Berhasil

Sedangkan penyimpulan pada tingkat sasaran yang memiliki indikator kinerja lebih dari satu menggunakan "Metode Rata-rata Tertimbang Data Kelompok". Dalam metode ini, capaian masing-masing indikator dikonversi dalam skala pengukuran ordinal yaitu:

Nilai Tengah	Penilaian
92,5%	Sangat Berhasil
77,5%	Berhasil
62.5%	Cukup Berhasil
27.5%	Tidak Berhasil

Nilai akhir capaian (%) sasaran tersebut yaitu rata-rata dari Hasil Perkalian jumlah indikator pada kategori yang sama dengan nilai tengah kategori tersebut.

$$\text{Rumus} = \frac{(\text{Jumlah Nilai Kelompok Kategori} \times \text{Mean Kategorinya})}{\text{Jumlah Indikator}} \times 100\%$$



Hasil perhitungan pencapaian kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel III.1  
Capaian Kinerja Sasaran



No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)		Satuan	Tahun 2023			Capaian Kinerja Sasaran
					Target 2023	Realisasi 2023	%	
1	2	3		4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	1.	Rata-rata Lama Sekolah	%	7,29	7,64	104,80	100,67
		2.	Harapan Lama Sekolah	%	12,74	12,30	96,55	
2.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1.	Harapan Hidup Saat Lahir	Tahun	72,31	74,07	102,4	102,4
3.	Meningkatnya daya beli masyarakat	1.	Pengeluaran perkapita	Rupiah/Bulan	1.315.960	1.397.653	106,2	106,2
4.	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	1.	Jumlah Konflik antar pemeluk agama	Kali	0	0	100	100
5.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	1.	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,25	4,68	110,11	110,11
6.	Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran	1.	Persentase penduduk di atas garis kemiskinan	%	92,35	91,82	99,43	126,71
		2.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,5	2,92	154	
7.	Meningkatnya Desa mandiri	1.	Persentase Desa mandiri	%	25,83	28,90	111,88	111,88
8.	Meningkatnya Kontribusi sektor Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB	1.	Kontribusi sektor Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB (%)	%	29,59	23,59	79,72	79,72
9.	Terjaganya stabilitas perekonomian daerah	1.	Tingkat Inflasi daerah	%	4,4	2,02	154,09	154,09
10.	Menurunnya ketimpangan pendapatan	1.	Gini Ratio	%	0,25	0,31	80,64	80,64
11.	Meningkatnya kualitas infrastruktur Wilayah	1.	Indeks Infrastruktur Wilayah	%	52,5	n/a	0	0
12.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	69,15	72,97	105,52	105,52
13.	Meningkatnya transparansi, akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan	1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	B	B	100	102,75





No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2023			Capaian Kinerja Sasaran
				Target 2023	Realisasi 2023	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja	Kategori	B	B	100	
		3. Opini atas Laporan Keuangan	Kategori	WTP	WTP	100	
		4. Indeks SPBE	Indeks	1,7	1,89	111	

Kesimpulan dari 18 (delapan belas) indikator tersebut, adalah sebagai berikut :

- Sangat Berhasil 15 = 83,39%
- Berhasil 2 = 11,11%
- Cukup Berhasil 0 = 0%
- Tidak Berhasil 1 = 5,5%
- Jumlah 18 = 100%

### Analisis Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2023

#### Sasaran 1 MENINGKATNYA KUALITAS PENDIDIKAN MASYARAKAT

Pelaksanaan sasaran ini untuk mencapai misi “Melaksanakan pembangunan pendidikan dan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat. Capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat” dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut :

#### 1. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja

Tabel III.2

Perbandingan Antara Target dan Realisasi  
Indikator Pencapaian Sasaran 1



Indikator		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,29	7,64	104,80
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,74	12,30	96,55
Capaian Kinerja Sasaran : <b>Sangat Berhasil</b>					<b>100,67</b>

Tabel di atas menggambarkan pencapaian sasaran selama tahun 2023, secara ringkas diuraikan berikut ini:

1) Rata-Rata Lama Sekolah

Capaian indikator Persentase Rata-Rata Lama Sekolah sebesar 104,80%, sehingga dapat dikategorikan **Sangat Berhasil**. Pada tahun 2023 indikator ini ditargetkan sebesar 7,29 dan terealisasi sebesar 7,64. Realisasi ini diperoleh dari jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani.

2) Harapan Lama Sekolah

Capaian indikator Persentase Harapan Lama Sekolah sebesar 96,55%, sehingga dapat dikategorikan **Sangat Berhasil**. Pada tahun 2023 indikator ini ditargetkan sebesar 12,74 dan terealisasi 12,30. Realisasi ini diperoleh dari jumlah Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan Lama Sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang.

## 2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Kondisi Awal (Tahun 2020), Realisasi Tahun 2021 dan Tahun 2022

Tabel III.3

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1 dengan kondisi awal dan target akhir RPJMD,

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal (Tahun 2020)	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7



No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal (Tahun 2020)	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	1 Rata-rata Lama Sekolah	7,07	7,08	7,09	7,64
		2 Harapan Lama Sekolah	12,03	12,04	12,29	12,30

Realisasi Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Tahun 2023 dibandingkan dengan kondisi awal indikator kinerja di dalam RPJMD mengalami peningkatan, dan jika disanding dengan tahun 2022 juga mengalami kenaikan peningkatan kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa sasaran telah berkategori sangat berhasil secara signifikan.

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Tabel III.4

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1 dengan Target Akhir RPJMD

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Akhir RPJMD 2026	Realisasi Tahun 2023	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	7	8
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	1 Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,51	7,64	101,7
		2 Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,46	12,30	91,38

Realisasi Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2023 dibandingkan dengan kondisi akhir indikator kinerja di dalam RPJMD telah mencapai target akhir dengan mengalami peningkatan sebesar 0,13%. Sedangkan, untuk Harapan Lama Sekolah belum mencapai target akhir dengan selisih sebesar 1,13%.



#### 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional

Tabel III.5

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1 dengan Target RPJMD

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Nasional 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	7	8
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	1 Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,77	7,64	87,11
		2 Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,15	12,30	93,5

Realisasi Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2023 dibandingkan dengan target nasional belum mencapai target akhir dengan nilai sebesar 87,11%. Sedangkan, untuk Harapan Lama Sekolah juga belum mencapai target nasional dengan nilai sebesar 93,5%. Walaupun kedua indikator belum mencapai target nasional, realisasi kinerja indikator untuk Kabupaten Sintang sudah tergolong baik dengan kategori Berhasil.

#### 5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat Tahun 2023 dapat dikatakan sangat berhasil.

##### 1) Rata-Rata Lama Sekolah

Realisasi Rata-Rata Lama Sekolah pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami kenaikan, namun dalam capaian target sangat baik yaitu 101,24%. Akan tetapi, walaupun terjadi peningkatan kinerja, hal ini menunjukkan masih perlunya peningkatan program dan kegiatan yang terkait dengan upaya pemerintah Kabupaten Sintang untuk meningkatkan Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Sintang, yaitu dengan menyediakan sarana dan prasarana



Pendidikan. Peningkatan kinerja Rata-Rata Lama Sekolah mengindikasikan keberhasilan pembangunan pendidikan melalui :

- a) Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat yang ditunjukkan dengan meningkatnya APK PAUD, APM dan APK SD/MI, dan SMP/MTs;
- b) Meningkatnya persentase ruang kelas baik;
- c) Infrastruktur kebutuhan dasar semakin meningkat dalam pengembangan usaha dan pelayanan publik;
- d) Kondisi infrastruktur di daerah perbatasan Negara dan daerah tertinggal masih sangat terbatas;

## 2) Harapan Lama Sekolah

Realisasi Harapan Lama Sekolah pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami kenaikan, namun dalam capaian target sangat baik yaitu 93,5%. Hal ini masih perlu memperhatikan kondisi sistem pendidikan di berbagai jenjang. Keberhasilan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Sintang tidak terlepas dari peningkatan taraf hidup masyarakat serta meningkatnya infrastruktur yang disediakan oleh Pemerintah. Peningkatan kinerja Harapan Lama Sekolah mengindikasikan keberhasilan pembangunan pendidikan melalui :

- a) peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu;
- b) pemerataan akses Pendidikan;
- c) anak usia 7 tahun ke atas mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar;
- d) Pemerintah kabupaten khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan terus mengupayakan pelaksanaan program yang menjadi prioritas berikut pendanaannya;



## 6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel III.6  
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Indikator Kinerja Utama	Program/Kegiatan	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7
1	Rata-rata Lama Sekolah	211.569.325.023,00	195.769.235.091,31	92,53	104,80	
2	Harapan Lama Sekolah			96,55		
				92,53	100,67	8,14

Realisasi Anggaran Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah yang berada pada program yang sama yaitu Program Pengelolaan Pendidikan. Realisasi kinerja kedua indikator untuk Kabupaten Sintang sudah tergolong baik dan efisien mencapai 8,14% dengan kategori Sangat Berhasil.

## 7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan :

### 1) Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-Rata Lama Sekolah merupakan salah satu unsur yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan pendidikan di dunia, termasuk Kabupaten Sintang. Pencapaian target indikator kinerja Rata-Rata Lama Sekolah dilakukan melalui Program Pengelolaan Pendidikan dengan kegiatan berikut ini :

- Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar;
- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;

### 2) Harapan Lama Sekolah



Harapan Lama Sekolah merupakan diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang, termasuk Kabupaten Sintang. Pencapaian target indikator kinerja Harapan Lama Sekolah dilakukan melalui Program Pengelolaan Pendidikan dengan kegiatan berikut ini :

- a) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar;
- c) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- d) Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;

## **Sasaran 2**

### **Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat**

Pelaksanaan sasaran ini untuk mencapai misi “Melaksanakan pembangunan pendidikan dan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat”.

Sasaran “Tercapainya Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut:

#### **1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja**

Tabel III.7  
Indikator Pencapaian Sasaran 2

Indikator		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Harapan Hidup Saat Lahir	Tahun	72,31	74,07	102,4
2.					
3.					
Capaian Kinerja Sasaran : <b>Sangat Berhasil</b>					<b>102,4</b>

Capaian indikator Harapan Hidup Saat Lahir sebesar 102,4%, sehingga dapat dikategorikan **Sangat Berhasil**. Pada tahun 2023 indikator Harapan Hidup Saat Lahir telah mencapai target yang telah ditetapkan.



## 2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2020) dan Tahun 2021 serta Tahun 2022

Tabel III.8  
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 2 dengan kondisi awal dan realisasi tahun 2022 serta tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Sat	Kondisi Awal (Tahun 2020)	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat	1 Harapan hidup saat lahir	Tahun	71,71	71,84	72,12	74,07

Realisasi Harapan Hidup Saat Lahir pada tahun 2023, dibandingkan dengan kondisi awal indikator kinerja di dalam RPJMD dan tahun-tahun sebelumnya mengalami peningkatan. Selanjutnya, capaian sasaran ini dapat dikategorikan **Sangat Berhasil** di tahun 2023 dengan nilai sebesar 102%. Dengan meningkatnya usia harapan hidup mengindikasikan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang mampu mensosialisasikan pola hidup sehat khususnya penanganan kepada lansia

## 3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Tabel III.9  
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 2 dengan Target Akhir RPJMD

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Akhir RPJMD 2026	Realisasi Tahun 2023	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	7	8
1	Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat	1 Harapan hidup saat lahir	Tahun	72,79	74,07	102,7





Realisasi Harapan Hidup Saat Lahir Tahun 2023 dibandingkan dengan kondisi akhir indikator kinerja di dalam RPJMD telah mencapai target akhir dengan mengalami peningkatan sebesar 1,28. Hal ini menunjukkan bahwa indikator Harapan Hidup Saat Lahir di Kabupaten Sintang telah mencapai target akhir dengan kategori Sangat Berhasil.

#### 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional

Tabel III.10

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 2 dengan Target RPJMD

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Nasional 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	7	8
1	Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat	1 Harapan hidup saat lahir	Tahun	74,39	74,07	99,56

Realisasi Harapan Hidup Saat Lahir Tahun 2023 dibandingkan dengan target nasional belum mencapai target akhir dengan nilai sebesar 99,56%. Walaupun kedua indikator belum mencapai target nasional, realisasi kinerja indikator untuk Kabupaten Sintang sudah tergolong baik dengan kategori Sangat Berhasil.

#### 5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Untuk meningkatkan Harapan Hidup Saat Lahir melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang melakukan upaya-upaya berikut ini :

- 1) Faktor yang meningkatkan Angka Harapan Hidup dapat ditinjau dari beberapa hal seperti kondisi lingkungan dan status sosial ekonomi penduduk, ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan, status gizi,



dan lain-lain. Oleh karena itu, Angka Harapan Hidup cukup representative digunakan sebagai indikator dalam menilai tingkat kesehatan penduduk di suatu daerah. Semakin tinggi nilai Angka Harapan Hidup di suatu daerah, maka secara tidak langsung dapat menggambarkan semakin membaiknya tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum. Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang telah melakukan upaya pemerataan tenaga medis dan fasilitas Kesehatan ke seluruh wilayah Kabupaten Sintang.

- 2) Selain pemerataan tenaga medis dan fasilitas kesehatan, upaya lain yang dilakukan yaitu dengan giat mensosialisasikan “Perilaku Hidup Sehat” kepada seluruh Masyarakat Kabupaten Sintang, seperti menjaga kebersihan lingkungan, mencuci tangan, rajin berolahraga dan lain-lain.

## 6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel III.11  
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Indikator Kinerja Utama	Program/ Kegiatan	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7
1	Harapan Hidup Saat Lahir	67.500.000,00	66.867.174,00	99,06	102,4	
	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	373.745.800,00	373.745.800,00	94,31		
	Program Perlindungan Perempuan	156.354.600,00	155.884.625,00	99,70		
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	20.000.000,00	19.945.000,00	99,72		
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	94.644.000,00	94.495.000,00	99,84		
	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	341.633.600,00	328.709.137,00	96,22		
	Program Perlindungan Khusus Anak	4.935.237.300,00	4.612.326.013,00	93,46		
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)					



Indikator Kinerja Utama	Program/Kegiatan	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	6.176.999.750,00	6.067.865.598,00	98,23		
	Program Pengendalian Penduduk	339.549.580,00	336.829.400,00	99,20		
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	78.283.677.182,00	67.715.507.188,00	86,50		
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	6.967.552.000,00	4.187.384.420,00	60,10		
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	346.002.000,00	225.919.730,00	65,29		
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	137.640.800,00	133.948.010,00	97,32		
		98.240.536.612,00	84.319.427.095,00	91,45	102,4	10,95

Realisasi Anggaran Harapan Hidup Saat Lahir yang berada pada 13 program sebesar 91,45 % dengan capaian kinerja hingga 102,4%. Ini menunjukkan bahwa realisasi kinerja indikator Harapan Hidup Saat lahir untuk Kabupaten Sintang sudah tergolong baik dan efisien mencapai 10,95% dengan kategori Sangat Berhasil.

## 7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

### 1) Harapan Hidup Saat Lahir

Dengan meningkatnya usia harapan hidup mengindikasikan bahwa Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan beserta kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota juga Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber



Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang sangat optimal.

### Sasaran 3 Meningkatnya Daya Beli Masyarakat

Pelaksanaan sasaran ini untuk mencapai misi “Melaksanakan pembangunan pendidikan dan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat”.

Kinerja sasaran “Pengeluaran Per Kapita” dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut:

#### 1. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja

Tabel III.12  
Indikator Pencapaian Sasaran 3

Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1. Pengeluaran per kapita	Rp/Bulan	1.315.950	1.397.653	106,2
Capaian Kinerja Sasaran : <b>Sangat Berhasil</b>				

#### 1) Pengeluaran Per Kapita

Capaian indikator Pendapatan Per Kapita ditargetkan pada tahun 2023 sebesar Rp. 1.315.950 dan terealisasi senilai Rp. 1.397.650 dengan persentase sebesar 106,2%, sehingga dikategorikan **Sangat Berhasil**.



## 2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2020), Tahun 2021 dan Tahun 2022

Tabel III.13  
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 3 dengan kondisi awal, realisasi tahun 2022, dan realisasi 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2020)	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Meningkatnya daya beli masyarakat	1 Pengeluaran per kapita	Rupiah/Bulan	1.274.550	-	1.274.550	1.397.650

Realisasi Pengeluaran Per Kapita pada tahun 2023 dibandingkan dengan kondisi awal indikator kinerja di dalam RPJMD mengalami kenaikan sebesar Rp. 123.100. Jika dibandingkan realisasi pada tahun 2021 ke 2022 terjadi penurunan sebesar Rp. 123.100, apabila dipersentasekan sebesar 9,6% yang dikategorikan sangat berhasil.

## 3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Tabel III.14  
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 3 dengan Target Akhir RPJMD

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Akhir RPJMD 2026	Realisasi Tahun 2023	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	7	8
1	Meningkatnya daya beli masyarakat	1 Pengeluaran per kapita	Rupiah/Bulan	1.440.150	1.397.650	97,04

Realisasi Pengeluaran Per Kapita Tahun 2023 dibandingkan dengan kondisi akhir indikator kinerja di dalam RPJMD hampir mencapai target akhir dengan mengalami peningkatan sebesar 97,04%. Hal ini



menunjukkan bahwa indikator Pengeluaran Per Kapita di Kabupaten Sintang hampir mencapai target akhir dengan kategori **Sangat Berhasil**.

#### 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional

Tabel III.15  
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 3 dengan Target RPJMD

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Nasional 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	7	8
1	Meningkatnya daya beli masyarakat	1 Pengeluaran per kapita	Rupiah/Bulan	-	1.397.650	

Realisasi Pengeluaran Per Kapita Tahun 2023 dibandingkan dengan target nasional belum mencapai target akhir karena tidak terdapat dokumen yang menargetkan Pengeluaran Per Kapita secara Nasional. Walaupun indikator belum mencapai target nasional, realisasi kinerja indikator Pengeluaran Per Kapita untuk Kabupaten Sintang sudah tergolong baik dengan kategori **Sangat Berhasil**.

#### 5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Pengeluaran Per Kapita pada tahun 2023 mengalami kenaikan 9,6% dari tahun 2022. Namun masih belum bisa mencapai target yaitu masih di bawah Rp. 1.440.150. Hal ini masih perlu menjadi perhatian oleh Pemerintah Kabupaten Sintang. Jika dilihat dari jenis pengeluarannya, penduduk Kabupaten Sintang lebih banyak memiliki pengeluaran makanan dibandingkan pengeluaran non makanan, yaitu 52,14% pengeluaran untuk makanan dan 47,86% untuk pengeluaran non makanan. Untuk pengeluaran makanan, komoditas yang paling besar persentasenya adalah makanan dan minuman jadi, yaitu sebesar 12,10



%, kemudian disusul dengan rokok yaitu sebesar 7,13%. Sedangkan untuk pengeluaran non makanan, komoditas yang paling besar persentasenya adalah perumahan dan fasilitas rumah tangga. Kendala yang dihadapi dalam peningkatan Pengeluaran Per Kapita antara lain disebabkan oleh masih sulitnya transportasi, belum meratanya masyarakat yang mendapatkan sarana perdagangan, dan kondisi geografis daerah pedalaman/pedesaan yang sulit dijangkau serta masih banyaknya komoditi pangan yang masih diimpor dari kabupaten lain. Upaya yang dilakukan yaitu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai salah satu faktor pendukung pengeluaran per kapita Masyarakat, meningkatkan lapangan pekerjaan melalui pemberdayaan Masyarakat pada bidang pariwisata, koperasi, usaha kecil dan menengah.

## 6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel III.16  
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Indikator Kinerja Utama	Program/Kegiatan	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya daya beli masyarakat	35.122.800,00	34.122.200,00	97,15	106,2	
	Program Penanganan Kerawanan Pangan					
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	63.199.000,00	63.199.000,00	100,00		
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	1.846.342.000,00	1.819.567.964,00	98,55		
		1.944.663.800,00	1.916.889.164,00	98,56	106,2	7,64

Realisasi Anggaran Pengeluaran Per Kapita yang berada pada 3 program sebesar 98,56% dengan capaian kinerja hingga 106,2%. Ini menunjukkan bahwa realisasi kinerja indikator Pengeluaran Per Kapita untuk Kabupaten Sintang sudah tergolong baik dan efisien mencapai



7,64% dengan kategori **Sangat Berhasil**.

#### 7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kinerja sasaran “Meningkatnya Daya Beli Masyarakat” berkategori **Sangat Berhasil**. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan Pengeluaran per kapita Masyarakat Kabupaten Sintang yang digunakan untuk membeli kebutuhan pokok yang ada di pasar tradisional maupun pasar modern yang ada di Kabupaten Sintang. Adapun program yang mendukung keberhasilan indicator ini antara lain :

- a. Program Penanganan Kerawanan Pangan;
- b. Program Pengawasan Keamanan Pangan;
- c. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

### **Sasaran 4 Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama**

Pelaksanaan sasaran ini untuk mencapai misi “Melaksanakan toleransi, kesetaraan, dan Kerjasama dalam kerukunan kehidupan antar dan intern umat beragama”.

Kinerja sasaran “Jumlah Konflik Antar Pemeluk Agama” dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut:

#### 1. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja

Tabel III.17

Indikator Pencapaian Sasaran 4

Indikator		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Jumlah konflik antar pemeluk agama	Kali	0	0	100
Capaian Kinerja Sasaran <b>Sangat Berhasil</b>					<b>100</b>





1) Jumlah Konflik Antar Pemeluk Beragama

Capaian indikator Jumlah Konflik Antar Pemeluk Agama sebesar 100%, sehingga dapat dikategorikan **Sangat Berhasil**. Pada tahun 2023 Jumlah Konflik Antar Pemeluk Agama ditargetkan sebesar 0 Kali, dan sudah terealisasi 0 Kali.

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2020), Tahun 2021 dan Tahun 2022

Tabel III.18

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 4 dengan kondisi awal, realisasi tahun 2023, tahun 2022 dan 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	1 Jumlah konflik antar pemeluk agama	Kali	0	0	0	0

Realisasi konflik antar umat beragama dengan target dan realiasi 0, mencapai kategori sangat berhasil dengan nilai sebesar 100%. Hal ini menunjukkan masyarakat di Kabupaten Sintang sangat menjunjung tinggi toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Tabel III. 19

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 4 dengan Target Akhir RPJMD

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Akhir RPJMD 2026	Realisasi Tahun 2023	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	7	8



No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Akhir RPJMD 2026	Realisasi Tahun 2023	Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	1 Jumlah konflik antar pemeluk agama	Kali	0	0	100

Realisasi Jumlah Konflik Antar Pemeluk Agama Tahun 2023 dibandingkan dengan kondisi akhir indikator kinerja di dalam RPJMD telah mencapai target akhir. Hal ini menunjukkan bahwa indikator Jumlah Konflik Antar Pemeluk Agama di Kabupaten Sintang telah mencapai target akhir dengan kategori Sangat Berhasil.

#### 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional

Tabel III.20

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 4 dengan Target RPJMD

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Nasional 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	7	8
1	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	1 Jumlah konflik antar pemeluk agama	Kali	-	0	100

Realisasi Jumlah Konflik Antar Pemeluk Agama Tahun 2023 dibandingkan dengan target nasional tidak dapat disandingkan, sebab tidak terdapat target yang ditetapkan Nasional perihal kerukunan hidup dan konflik sosial. Walaupun indikator belum mempunyai target nasional, realisasi kinerja indikator untuk Kabupaten Sintang sudah tergolong baik dengan kategori Sangat Berhasil sesuai dengan prinsip hidup Masyarakat Indonesia yang mengedepankan toleransi antar umat beragama.



## 5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Realisasi indikator kinerja konflik antar umat beragama apabila dibandingkan dengan kondisi awal mampu mempertahankan nilai sebesar 100% dan dibandingkan dengan target mencapai kategori sangat berhasil yaitu mencapai 100%. Masyarakat di Kabupaten Sintang dengan berbagai latar belakang suku, budaya, agama dan ras sangat menghargai akan perbedaan sehingga konflik-konflik sosial tidak pernah terjadi di tahun 2023.

## 6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel III.21  
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Indikator Kinerja Utama	Program/ Kegiatan	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah konflik antar pemeluk agama	928.450.000,00	923.643.108,00	99,48		
	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan					
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	64.901.000,00	63.433.400,00	97,74		
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	630.034.720,00	625.434.630,00	99,27		
	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	50.000.000,00	49.985.000,00	99,97		



Indikator Kinerja Utama	Program/ Kegiatan	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	49.959.000,00	49.861.400,00	99,80		
		1.723.344.720,00	1.712.357.538,00	99,25	100	0,75

Realisasi Anggaran Indikator Jumlah Konflik Antar Pemeluk Agama mencapai 99,25% dengan realisasi kinerja sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa, realisasi kinerja indikator Jumlah Konflik Antar Pemeluk Agama untuk Kabupaten Sintang sudah tergolong baik dan efisien mencapai 0,75% dengan kategori **Sangat Berhasil**.

#### 7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Nilai konflik antar umat beragama diperoleh dari adanya kejadian atau konflik antar masyarakat yang berbeda suku, ras, budaya dan agama. Sepanjang tahun 2023, tidak ada konflik atau pertikaian yang terjadi di Kabupaten Sintang. Keberhasilan ini didukung oleh Pemerintah Kabupaten Sintang yang berkomitmen menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat Kabupaten Sintang dengan memberikan sosialisasi, mengadakan event dan menjaga kebudayaan melalui dana yang cukup di beberapa perangkat daerah yang menangani hal tersebut ditunjang oleh :

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan;
2. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya;
3. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial;



## Sasaran 5 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi

Pelaksanaan sasaran ini untuk mencapai misi “Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pedesaan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat”.

Kinerja sasaran “Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi” dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut:

### 1. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja

Tabel III.22

Indikator Pencapaian Sasaran 5

Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	%	4,25	4,68	110,11
Capaian Kinerja Sasaran : <b>Sangat Berhasil</b>				

#### 1) Menigkatnya Pertumbuhan Ekonomi

Capaian indikator Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 110,11%, sehingga dapat dikategorikan **Sangat Berhasil**. Pada tahun 2023 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi ditargetkan sebesar 4,25%, dan sudah terealisasi sebesar 4,68%.

### 2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2020), Tahun 2021 dan Tahun 2022

Tabel III.23

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 5 dengan kondisi awal, realisasi tahun 2021 dan tahun 2022



NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	Kondisi Awal Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pedesaan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat	1 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	%	-2,19	3,80	4,96	4,68

Realisasi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 dibandingkan dengan kondisi awal indikator kinerja di dalam RPJMD telah meningkat secara signifikan, sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2022 mengalami sedikit penurunan yang dapat diasumsikan dapat mempertahankan kinerja dengan kategori sangat berhasil.

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Tabel III.24

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 5 dengan Target Akhir RPJMD

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Akhir RPJMD 2026	Realisasi Tahun 2023	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	7	8
1	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pedesaan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat	1 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	%	5,87	4,68	79,72

Realisasi Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sintang Tahun 2023 dibandingkan dengan kondisi akhir indikator kinerja di dalam RPJMD belum mencapai target akhir. Hal ini menunjukkan bahwa indikator



Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sintang belum mencapai target akhir namun dengan kategori **Berhasil**.

#### 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional

Tabel III.25

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 5 dengan Target RPJMD

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Nasional 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	7	8
1	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pedesaan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat	1 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	%	5,3	4,68	88,30

Realisasi Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sintang Tahun 2023 dibandingkan dengan target nasional dapat disandingkan, sebab terdapat target yang ditetapkan Nasional perihal pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data di atas, realisasi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sintang pada tahun 2023 sebesar 4,68 % telah mencapai kinerja sebesar 88,30% apabila disandingkan dengan target Nasional di dalam Batang Tubuh RKP yang ditargetkan sebesar 5,3% dengan kategori **Berhasil**.

#### 5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Indikator Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2023 capaian kinerjanya mencapai 110,11%. Hal ini menggambarkan kinerja Pemerintah Kabupaten Sintang untuk laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sintang tergolong Sangat Berhasil. Pencapaian keberhasilan indikator pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sintang dipengaruhi oleh Kemajuan



ekonomi yang ditunjukkan oleh peningkatan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) atas dasar harga berlaku dari tahun ke tahun belum menunjukkan perubahan nyata (riil). Di samping karena terjadinya peningkatan produksi secara fisik, juga karena dipengaruhi oleh kenaikan harga atau inflasi. Untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi secara nyata, pengaruh inflasi harus dihilangkan. Oleh karena itu, PDRB dihitung dengan menggunakan harga konstan sesuai dengan Tingkat harga pada suatu tahun dasar yang telah ditetapkan, dalam hal ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010. Dengan cara ini maka dapat diperkirakan laju pertumbuhan ekonomi setiap tahun atau selama periode tertentu. Pada tahun 2023, PDRB Kabupaten Sintang atas dasar harga berlaku mencapai 18,58 triliun rupiah. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2023 meningkat menjadi 10,69 triliun rupiah dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,68 %. Laju pertumbuhan ekonomi ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 4,96 %. Untuk lebih meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan sekaligus mewujudkan pemerataan pendapatan, perlu adanya peningkatan mutu sumber daya manusia yang diikuti pengendalian jumlah penduduk serta peningkatan infrastruktur.

Keterpaduan antara program pemerintah dengan peran swasta dan masyarakat perlu diperhatikan guna menyelaraskan langkah dalam menggali sektor-sektor potensial yang sekaligus memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi secara riil yang diikuti dengan perubahan harga yang cepat pada setiap sektor ekonomi mengakibatkan struktur perekonomian mengalami perubahan. Struktur perekonomian Kabupaten Sintang pada tahun 2023 didominasi oleh tiga kategori ekonomi yaitu kategori pertanian, kategori perdagangan, dan kategori konstruksi. Pada tahun 2023, ketiga sektor tersebut peranannya mencapai 56,79 %. Kategori pertanian memberikan kontribusi terbesar yaitu 23,59 %, kemudian diikuti kategori perdagangan sebesar 17,41 %, serta kategori konstruksi sebesar 15,79 %. Sektor yang





paling kecil sumbangannya yaitu pengadaan Listrik dan gas sebesar 0,03 persen.

## 6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel III.26  
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 4 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja Utama	Program/ Kegiatan	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi	
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	75.115.350,00	74.922.250,00	99,74	110,11	
		Program Promosi Penanaman Modal	71.509.000,00	71.241.400,00	99,63		
		Program Pelayanan Penanaman Modal	313.810.270,00	288.662.425,00	91,99		
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	489.457.512,00	462.101.462,00	94,41		
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	65.612.000,00	65.210.800,00	99,39		
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	199.999.880,00	199.042.019,00	99,52		
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	47.645.800,00	47.247.840,00	99,16		
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri	9.900.000,00	9.750.000,00	98,48		
		Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	17.966.800,00	16.892.600,00	94,02		



Indikator Kinerja Utama	Program/ Kegiatan	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.277.286.707,00	1.253.307.500,00	98,12		
	Program Pemasaran Pariwisata	400.000.000,00	399.364.000,00	99,84		
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	4.805.557.370,00	4.798.736.344,00	99,86		
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	31.929.500,00	31.814.500,00	99,64		
	Program Penilaian Kesehatan Ksp / Usp Koperasi	20.861.400,00	20.303.941,00	97,33		
	<b>RATA-RATA</b>	<b>7.826.651.589,00</b>	<b>7.738.597.081,00</b>	<b>97,93</b>	<b>110,11</b>	<b>12,18</b>

Realisasi Anggaran Indikator Pertumbuhan Ekonomi mencapai 97,93% dengan realisasi kinerja sebesar 110,11%. Hal ini menunjukkan bahwa, realisasi kinerja indicator Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi untuk Kabupaten Sintang sudah tergolong baik dan efisien sebesar 12,18% dengan kategori Sangat Berhasil.

## 7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan capaian kinerja sasaran "Pertumbuhan Ekonomi" sangat didukung oleh beberapa perangkat daerah diantaranya Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dengan terlaksananya program sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
2. Program Promosi Penanaman Modal



3. Program Pelayanan Penanaman Modal
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
5. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
6. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
7. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
8. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri
9. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
10. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
11. Program Pemasaran Pariwisata
12. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
13. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
14. Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi

### **Sasaran 6: Menurunnya Angka Kemiskinan dan Pengangguran**

Pelaksanaan sasaran ini untuk mencapai misi “Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pedesaan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat”.

Kinerja sasaran “Menurunnya Angka Kemiskinan dan Pengangguran” dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut:

#### **1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja**

Tabel III.27  
Indikator Pencapaian Sasaran 6

	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Penduduk Di atas Garis Kemiskinan	%	92,35	91,82	99,43
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,5	2,92	154,09



Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Capaian Kinerja Sasaran : <b>Sangat Berhasil</b>				<b>126,76</b>

1) Persentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan

Capaian indikator Persentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan di Kabupaten Sintang 99,43% dapat dikategorikan **Sangat Berhasil**. Pada tahun 2023 Persentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan sebesar 91,82% dari target sebesar 92,35%.

2) Tingkat Pengangguran Terbuka

Capaian indikator Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 154,09% sehingga dapat dikategorikan **Cukup Berhasil**. Pada tahun 2023 Tingkat Pengangguran Terbuka terealisasi sebesar 2,92 dari target 4,5.

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Kondisi Tahun 2022, Tahun 2021 dan Target Awal RPJMD (Tahun 2020)

Tabel III.28

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 6 dengan kondisi awal, realisasi tahun 2022 dan tahun 2021 serta target awal RPJMD

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	Kondisi Awal Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023
1	2	3		4	5	6	7	8
6	Menurunnya Angka Kemiskinan dan Pengangguran	1	Persentase Penduduk Di atas Garis Kemiskinan	%	90,73	-	91,43	91,82
		2.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,5	3,95	4,04	2,92

Indikator Persentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan tahun 2023 dibanding kondisi awal tahun 2020 terjadi peningkatan sebesar 1,09.



Sedangkan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2023 dibandingkan kondisi awal tahun 2020 meningkat sebesar 2,3.

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Tabel III.29

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 6 dengan Target Akhir RPJMD

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Akhir RPJMD 2026	Realisasi Tahun 2023	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	7	8
1	Menurunnya Angka Kemiskinan dan Pengangguran	1 Persentase Penduduk Di atas Garis Kemiskinan	%	93,97	91,82	97,71
		2 Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,5	2,92	119,8

Realisasi Persentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan Tahun 2023 dibandingkan dengan kondisi akhir indikator kinerja di dalam RPJMD belum mencapai target akhir RPJMD dengan nilai 97,71%. Sedangkan untuk Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2023 dibandingkan dengan kondisi akhir indikator kinerja di dalam RPJMD sudah mencapai target akhir RPJMD dengan nilai 119,8%. Namun, kedua indikator ini terus menunjukkan peningkatan setiap tahunnya yang membuktikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sintang sangat berkomitmen untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran di daerah.

### 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional

Tabel III.30

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 6 dengan Target RPJMD



No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Nasional 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Kinerja (%)	
1	2	3	4	5	7	8	
1	Menurunnya Angka Kemiskinan dan Pengangguran	1	Persentase Penduduk Di atas Garis Kemiskinan	%	-	91,82	
		2	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,3	2,92	181,5

Realisasi Persentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan Tahun 2023 dibandingkan dengan target nasional tidak dapat disandingkan, sebab tidak terdapat target yang ditetapkan Nasional perihal penduduk diatas garis kemiskinan. Walaupun indikator belum mempunyai target nasional, realisasi kinerja indikator untuk Kabupaten Sintang sudah tergolong baik dengan kategori Sangat Berhasil meskipun belum sesuai dengan target. Sedangkan, Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2023 dibandingkan dengan target nasional dapat disandingkan, sebab terdapat target yang ditetapkan Nasional perihal Tingkat pengangguran terbuka yaitu 5,3% sedangkan Kabupaten Sintang mampu melebihi target dengan menekan Tingkat Pengangguran sebesar 2,92% dan mencapai kinerja sebesar 181,5%.

## 5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

### 1) Persentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan

Realisasi indikator Persentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan dikategorikan **Sangat Berhasil**. Oleh sebab itu, maka dapat disimpulkan adanya peningkatan kinerja indikator persentase penduduk miskin di atas garis kemiskinan dari tahun 2021-2023. Adapun beberapa hal yang mempengaruhi kondisi tersebut adalah:

- Bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat miskin dan rentan miskin



Bantuan sosial, sebagai bantalan ekonomi masyarakat miskin dan rentan, yang telah diberikan berupa bantuan sosial program PKH sebanyak 16.289 KPM, BPNT sebanyak 27.973 KPM, 44.087 KPM PBI JKN dan bantuan lainnya. Selain itu, pada tahun 2023, Kabupaten Sintang mendapat alokasi anggaran dari Pusat berupa Insentif Fiskal Aspek Kemiskinan sebesar Rp.5,39 miliar yang disalurkan berupa bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat miskin ekstrem. Beberapa bantuan yang disalurkan yaitu bantuan bibit, keramba, pakan ikan, benih, bantuan iuran premi ketenagakerjaan, bantuan bagi penyandang disabilitas dan lain sebagainya.

b. Kondisi inflasi yang terjaga

Dibandingkan dengan tahun 2022, inflasi di kabupaten Sintang lebih terjaga pada tahun 2023. Pada tahun 2023, kurva inflasi menunjukkan tren penurunan hingga Desember 2023 berada pada angka 2,02% (10 kabupaten terendah). Hal ini sebagai dampak tidak langsung dari stabilitas harga barang dan jasa di Kabupaten Sintang, salah satu strategi yang dilakukan adalah gencarnya program Pasar Tani.

c. Meningkatnya upaya kolaborasi dan sinergitas program penanggulangan kemiskinan

Upaya kolaborasi berbagai pihak, tidak hanya Pemerintah Daerah, namun juga peran dari Pihak Swasta, Akademisi dan NGO, menjadi perhatian bagi Tim Koordinasi Penanggulangan kemiskinan (TKPK) Kabupaten Sintang dalam merangkul semua sumber daya yang memungkinkan dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sintang. Upaya kolaborasi menghasilkan:



- Dokumen perencanaan aspek penanggulangan kemiskinan berupa:
  - ✓ Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Sintang Tahun 2023-2024
  - ✓ Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sintang Tahun 2023
  - ✓ Rencana Aksi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Sintang tahun 2023-2026
- MoU/Nota Kesepakatan:
  - ✓ MoU dengan PT. Rempah Bumi Borneo
  - ✓ Nota Kesepakatan dengan BPJS Ketenagakerjaan cabang Sintang
  - ✓ Naskah Komitmen Bersama dengan PT. Lingga jati Al-Manshurin

## 2) Tingkat Pengangguran Terbuka

Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka berdasarkan realisasi kinerja tahun 2023 yakni 2,92% dari target 4,50%, dapat disimpulkan sangat berhasil dalam menekan/mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Sintang, dimana semakin rendah realisasi maka menunjukkan semakin rendah pula tingkat pengangguran. Keberhasilan dalam mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Sintang disebabkan karena meningkatnya tingkat lulusan pendidikan yang terampil, meningkatnya tingkat keterampilan pencari kerja, serta peluang usaha yang ada di Kabupaten Sintang berpengaruh terhadap permintaan lowongan kerja sehingga mampu menekan angka pengangguran di Kabupaten Sintang.





## 6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel III.31  
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Indikator Kinerja Utama	Program/Kegiatan	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7
1	Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran	15.000.000,00	13.880.800,00	92,54		
	Program Perencanaan Tenaga Kerja					
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	688.182.400,00	680.224.856,00	98,84		
	Program Penempatan Tenaga Kerja	134.792.100,00	118.486.925,00	87,90		
	Program Hubungan Industrial	348.041.800,00	346.593.400,00	99,58		
	Program Pemberdayaan Sosial	238.865.000,00	231.639.100,00	96,97		
	RATA-RATA	1.424.881.300,00	1.390.825.081,00	95,16	126,71	31,55

Realisasi Anggaran Indikator Menurunnya Angka Kemiskinan dan Pengangguran mencapai 95,16% dengan realisasi kinerja sebesar 126,71%. Hal ini menunjukkan bahwa, realisasi kinerja indikator Menurunnya Angka Kemiskinan dan Pengangguran untuk Kabupaten Sintang sudah tergolong baik dan efisien dengan nilai 31,55% dengan kategori **Sangat Berhasil**.

## 7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

### 1) Persentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan

Berdasarkan realisasi Persentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan menunjukkan angka 91,82 masuk dalam kategori "**SANGAT BERHASIL**" dapat disimpulkan bahwa program maupun kegiatan



membuktikan komitmen Pemerintah Kabupaten Sintang sangat pro aktif dalam mengentaskan kemiskinan di daerah. Adapun program yang menjadi tagging aspek penanggulangan kemiskinan dibagi menjadi 3 kelompok besar berdasarkan strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sintang. Secara ringkas disajikan pada tabel berikut:

<b>Strategi - Program</b>
<b>1. Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan</b>
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
PROGRAM PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
<b>2. Mengurangi Beban Pengeluaran</b>
PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
Pengadaan Perlengkapan Siswa
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
Program Indonesia Pintar (PIP) Janjang SD
Program Indonesia Pintar (PIP) jenjang SMP
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
PROGRAM PENANGANAN BENCANA
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANA BUDIDAYA
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
<b>3. Meningkatkan Pendapatan</b>
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA



PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

## 2) Tingkat Pengangguran Terbuka

Pada Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka program kegiatan yang mendukung indikator tersebut yakni Program Perencanaan Tenaga Kerja Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja, Program Penempatan Tenaga Kerja Kegiatan Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota, dan kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja dengan realisasi kinerja sebesar 2,92% dari target 4,50% dengan Capaian 154,09%. Dari hasil tingkat pencapaian menunjukkan Sangat Berhasil dalam mengurangi angka pengangguran, dimana semakin rendah realisasi maka semakin rendah pula tingkat pengangguran.

### **Sasaran 7: Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri**

Pelaksanaan sasaran ini untuk mencapai misi “Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pedesaan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat”.

Kinerja sasaran “Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri” dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut:



## 1. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja

Tabel III.32

### Indikator Pencapaian Sasaran 7

Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
7. Persentase Desa Mandiri	%	25,83	28,90	111,88
Capaian Kinerja Sasaran : <b>Sangat Berhasil</b>				<b>111,88</b>

#### 1) Persentase Desa Mandiri

Capaian indikator Persentase Desa Mandiri sebesar 111,88% sehingga dapat dikategorikan **Sangat Berhasil**. Pada tahun 2023 Persentase Desa Mandiri terealisasi sebesar 28,90% dari target sebesar 25,83%

## 2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2020), Tahun 2021 dan Tahun 2022

Tabel III.33

### Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 7 dengan kondisi awal, realisasi tahun 2021, 2022 dan 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2020)	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023
1	2	3	4	5	6		
7	Meningkatnya jumlah desa mandiri	1 Persentase desa mandiri	%	15,60	-	16,62	28,90

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa indikator Persentase Desa Mandiri sudah ada peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, belum ada realisasi dan pada tahun 2022 sebesar 16,62% serta pada tahun 2023 sebesar 28,90%.



### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Tabel III.34

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 7 dengan Target Akhir RPJMD

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Akhir RPJMD 2026	Realisasi Tahun 2023	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	7	8
1	Meningkatnya jumlah desa mandiri	1 Persentase desa mandiri	%	46,29	28,90	62,43

Realisasi Persentase Desa Mandiri Tahun 2023 dibandingkan dengan kondisi akhir indikator kinerja di dalam RPJMD belum mencapai target akhir. Hal ini menunjukkan bahwa indikator Persentase Desa Mandiri di Kabupaten Sintang perlahan secara bertahap untuk mencapai target akhir dengan kategori **Cukup Berhasil**. Sedangkan untuk Realisasi Persentase Desa Mandiri Tahun 2023 dibandingkan dengan kondisi akhir indikator kinerja di dalam RPJMD sebesar 62,43%.

### 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional

Tabel III.35

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 7 dengan Target RPJMD

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Nasional 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	7	8
1	Meningkatnya jumlah desa mandiri	1 Persentase desa mandiri	%	-	28,90	

Realisasi Persentase Desa Mandiri Tahun 2023 dibandingkan dengan target nasional tidak dapat disandingkan, sebab tidak terdapat target yang ditetapkan Nasional perihal Persentase Desa Mandiri. Walaupun indikator belum mempunyai target nasional, realisasi kinerja indikator





Realisasi Anggaran Indikator Persentase Desa Mandiri mencapai 98,86% dengan realisasi kinerja sebesar 111,88%. Hal ini menunjukkan bahwa, realisasi kinerja indikator Persentase Desa Mandiri untuk Kabupaten Sintang sudah tergolong baik dan efisien mencapai 13,02% dengan kategori **Sangat Berhasil**.

#### 7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pada tahun 2023 Persentase Desa Mandiri terealisasi sebesar 28,90% dari target sebesar 25,83%. Meskipun berkategori Sangat Berhasil, namun belum mampu mencapai target akhir yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Berikut adalah program pendukung Desa Mandiri :

1. Yang menunjang keberhasilan adalah ketersediaan sarana prasana melalui program prioritas kebijakan dana desa.
2. Peran Pendamping Lokal Desa, Pendamping Desa dan Kecamatan dalam pendampingan penginputan dan Verifikasi IDM

### **Sasaran 8** **Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dan Perikanan Terhadap PDRB**

Pelaksanaan sasaran ini untuk mencapai misi “Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pedesaan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat”.

Kinerja sasaran “Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dan Perikanan Terhadap PDRB” dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut:

#### 1. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja

Tabel III.37

Indikator Pencapaian Sasaran 8



Indikator		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB	%	29,59	23,59	79,72
Capaian Kinerja Sasaran :		<b>Berhasil</b>			

1) Kontribusi Sektor Pertanian dan Perikanan Terhadap PDRB

Indikator Kontribusi Sektor Pertanian dan Perikanan Terhadap PDRB pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 29,59% terealisasi sebesar 23,59%, sehingga capaiannya adalah 79,72% dengan kategori “**Berhasil**”.

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2020), Tahun 2022 dan Tahun 2021

Tabel III.38  
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 8 dengan kondisi awal, realisasi tahun 2023, Tahun 2022 dan tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2020)	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Meningkatnya Kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB	1 Kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB	%	28,93	22,96	23,35	23,59

1) Kontribusi Sektor Pertanian dan Perikanan Terhadap PDRB





Realisasi indikator Kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB Pada tahun 2023 dibandingkan dengan kondisi awal indikator kinerja di dalam RPJMD menurun sebesar 5,34%.

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Tabel III.39

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 8 dengan Target Akhir RPJMD

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Akhir RPJMD 2026	Realisasi Tahun 2023	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	7	8
1	Meningkatnya Kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB	1 Kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB	%	30,87	23,59	76,41

Realisasi indikator Kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB Tahun 2023 dibandingkan dengan kondisi akhir indikator kinerja di dalam RPJMD belum mencapai target akhir dengan kinerja 76,41%. Hal ini menunjukkan bahwa indikator Kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB di Kabupaten Sintang belum mencapai target akhir dengan kategori Berhasil.

### 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional

Tabel III. 40

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 8 dengan Target RPJMD

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Nasional 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	7	8
1	Meningkatnya Kontribusi sektor pertanian dan	1 Kontribusi sektor pertanian dan perikanan	%	-	23,59	-



No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Nasional 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Kinerja (%)
	perikanan terhadap PDRB	terhadap PDRB				

Realisasi kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB Tahun 2023 dibandingkan dengan target nasional tidak dapat disandingkan, sebab tidak terdapat target yang ditetapkan Nasional perihal pertanian dan perikanan terhadap PDRB. Walaupun indikator belum mempunyai target nasional, realisasi kinerja indikator untuk Kabupaten Sintang sudah tergolong baik dengan kategori Berhasil.

#### **5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

##### Kontribusi Sektor Pertanian dan Perikanan Terhadap PDRB

Realisasi indikator Kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB Pada tahun 2023 mengalami peningkatan yang tidak signifikan. Hal ini karena disebabkan adanya berbagai faktor seperti adanya fenomena wabah penyakit hewan ternak yang menghambat perkembangbiakan hewan sehingga dalam beberapa waktu terjadi kelangkaan daging dan perubahan iklim atau cuaca yang tidak menentu yang mengakibatkan gagalnya panen di beberapa kesempatan. Untuk menanggulangi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan serta Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pengembangan sarana pertanian dan perternakan serta melakukan vaksinasi secara masal guna membasmi wabah penyakit menular pada hewan ternak.

#### **6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**





- 2) Penyediaan Benih / Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dalam satu daerah kabupaten / kota lain.
- b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian yaitu kegiatan sebagai berikut:
  - 1) Pengembangan Prasarana Pertanian.
  - 2) Pembangunan Prasarana Pertanian.
- c. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, yaitu kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten / Kota
- d. Program Perizinan Usaha Pertanian, yaitu kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah Kabupaten / Kota.
- e. Program Penyuluh Pertanian, yaitu kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.

### **Sasaran 9: Terjaganya Stabilitas Perekonomian Daerah**

Pelaksanaan sasaran ini untuk mencapai misi “Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pedesaan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat”. Kinerja sasaran “Terjaganya Stabilitas Perekonomian Daerah” dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut:

#### **1. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja**

Tabel III.42

Indikator Pencapaian Sasaran 9

Indikator		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Tingkat Inflasi Daerah	%	4,3	2,02	154,09
Capaian Kinerja Sasaran :					



1) Tingkat Inflasi Daerah

Indikator Tingkat Inflasi Daerah pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 4,3% terealisasi sebesar 2,02%, sehingga capaiannya adalah 154,09% dengan kategori "**Sangat Berhasil**".

**2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2020), Tahun 2022 dan Tahun 2021**

Tabel III.43  
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 9 dengan kondisi awal, realisasi tahun 2022 dan tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2020)	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023
1	2	3		4	5	6	7	8
9	Terjaganya Stabilitas Perekonomian Daerah	1	Tingkat Inflasi Daerah	%	4,68	1,88	6,50	2,02

1) Tingkat Inflasi Daerah

Realisasi indikator Tingkat Inflasi Daerah tahun 2023 sebesar 2,02 dibandingkan dengan kondisi awal indikator kinerja di dalam RPJMD sebesar 4,68 mengalami penurunan sebesar 2,66%. Jika dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 maka terjadi penurunan inflasi sebesar 4,48%.

**3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir Jangka Menengah Daerah (RPJMD)**

Tabel III.44

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 9 dengan Target Akhir RPJMD



No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Akhir RPJMD 2026	Realisasi Tahun 2023	Capaian Kinerja (%)	
1	2	3	4	5	7	8	
1	Terjaganya Stabilitas Perekonomian Daerah	1	Tingkat Inflasi Daerah	%	4	2,02	150

Realisasi indikator Tingkat Inflasi Daerah Tahun 2023 dibandingkan dengan kondisi akhir indikator kinerja di dalam RPJMD telah mencapai target akhir. Hal ini menunjukkan bahwa indikator Tingkat Inflasi Daerah di Kabupaten Sintang telah mencapai target akhir dengan kategori Sangat Berhasil dengan capaian 150% sebagai bukti bahwa Pemerintah Kabupaten Sintang melalui TPID berkomitmen penuh mengurangi angka inflasi daerah.

#### 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional

Tabel III.45

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 9 dengan Target RPJMD

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Nasional 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Kinerja (%)	
1	2	3	4	5	7	8	
1	Terjaganya Stabilitas Perekonomian Daerah	1	Tingkat Inflasi Daerah	%	3,3	2,02	163,36

Realisasi Tingkat Inflasi Daerah Tahun 2023 dibandingkan dengan target nasional sudah melebihi target yang ditetapkan. Dalam Batang Tubuh RKP Nasional Tahun 2023, Tingkat Inflasi Daerah ditargetkan sebesar 3,3%, sedangkan Kabupaten Sintang terealisasi sebesar 2,02%. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sintang berkomitmen secara penuh terhadap inflasi sebagai tindak lanjut atas pemulihan ekonomi pasca pandemi seperti yang diamanatkan oleh Presiden dengan mencapai kinerja sebesar 163,36%.



## 5. Analisis Penyebab Kegagalan Atau Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan:

### 1) Tingkat Inflasi Daerah

Pengendalian inflasi difokuskan dalam 4 (empat) upaya yang disingkat 4 K, yaitu Ketersediaan Barang, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang efektif. Inflasi *year-on-year* (yoy) tahun 2022 sebesar 6,50% yang masih berada di atas target angka inflasi nasional ( $3\pm 1\%$ ), hal tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak. Memasuki tahun 2023, terhitung mulai bulan Januari - Agustus 2023 andil inflasi yoy terbesar disumbang oleh kelompok pengeluaran transportasi sehingga menyebabkan peningkatan biaya produksi dan distribusi yang pada akhirnya kenaikan harga barang/jasa di Kabupaten Sintang. Dalam mengendalikan inflasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Sintang melalui OPD terkait bersama Bulog Sub Divisi Regional Sintang yang berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Badan Pangan Nasional, melaksanakan operasi pasar dan gelar pangan murah di Kabupaten Sintang secara rutin untuk menjamin ketersediaan barang dan keterjangkauan harga. Dalam menjaga kelancaran distribusi, Pemerintah Kabupaten Sintang bersama satgas pangan melaksanakan inspeksi mendadak ke agen-agen beras dan sembako serta ke SPBU yang ada di dalam Kota Sintang untuk memastikan stok barang yang tersedia, upaya serta kendala dalam suplai dan distribusi barang menuju Kota Sintang.

Dalam menjaga Komunikasi Efektif, pemerintah melaksanakan rapat koordinasi TPID, High Level Meeting Kabupaten Sintang, High Level Meeting Provinsi Kalimantan Barat, dan secara rutin mengikuti Rapat Koordinasi Nasional bersama Mendagri yang dilaksanakan setiap hari senin pagi secara daring.



## 6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel III.46

### Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Indikator Kinerja Utama	Program/ Kegiatan	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7
1	Tingkat Inflasi Daerah	1.740.847.425,00	1.734.473.320,00	99,63	154,09	
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan					
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	337.325.150,00	336.973.080,00	99,90		
	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	193.383.150,00	192.089.150,00	99,33		
	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	17.156.000,00	16.739.800,00	97,57		
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	232.320.500,00	230.724.542,00	99,31		
	<b>RATA-RATA</b>	<b>2.521.032.225,00</b>	<b>2.510.999.892,00</b>	<b>99,14</b>	<b>154,09</b>	<b>54,95</b>

Realisasi Anggaran Indikator Tingkat Inflasi Daerah mencapai 99,14% dengan realisasi kinerja sebesar 154,09%. Hal ini menunjukkan bahwa, realisasi kinerja indikator Tingkat Inflasi Daerah untuk Kabupaten Sintang sudah tergolong baik dan efisien mencapai 54,95% dengan kategori **Sangat Berhasil**.

## 7. Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Peningkatan Pencapaian Kinerja:

- 1) Tingkat Inflasi Daerah





Kinerja indikator Tingkat Inflasi Daerah didukung dengan program daerah sebagai berikut :

4k	Prog. Strategis	Program Kerja Daerah		OPD
Keterjangkauan harga	Stabilitas Harga	1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		2	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		3	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		4	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		5	Optimalisasi Kegiatan KPSH Beras (Operasi Pasar Murah Beras)	Bulog
	Pengelolaan Permintaan	6	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Dinas Pertanian dan Perkebunan
		7	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Ketersediaan Pasokan	Produksi Domestik	8	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		9	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		10	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Dinas Pertanian dan Perkebunan
		11	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Dinas Pertanian dan Perkebunan
		12	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Dinas Pertanian dan Perkebunan
		13	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Dinas Pertanian dan Perkebunan
		14	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Dinas Pertanian dan Perkebunan
	Penguatan Kelembagaan	15	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		16	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Dinas Pertanian dan Perkebunan
		17	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Kelancaran Distribusi	Meningkatkan Infrastruktur Perdagangan	18	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah



		19	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		20	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		21	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		22	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		23	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
<b>Komunikasi Efektif</b>	Memperbaiki Kualitas Data	24	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		25	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
	Koordinasi Pusat Dan Daerah	26	Penyusunan Peta Jalan TPID Sebagai Tindak Lanjut Penetapan Peta Jalan Pengendalian Inflasi daerah	BAPPEDA
		27	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	BAPPEDA
	Mengendalikan Ekspektasi Inflasi	28	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		29	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		30	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Sekretariat Daerah (Bag. Ekbang)

## Sasaran 10: Menurunnya Ketimpangan Pendapatan

Pelaksanaan sasaran ini untuk mencapai misi “Menurunnya Ketimpangan Pendapatan”.

Kinerja sasaran “Gini Ratio” dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut:



## 1. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja

Tabel III.47

Indikator Pencapaian Sasaran 10

Indikator		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Gini Ratio	%	0,25	0,31	80,64
Capaian Kinerja Sasaran :		<b>Berhasil</b>			

### 1) Gini Ratio

Indikator Gini Ratio pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 0,25 poin, terealisasi sebesar 0,31 poin, sehingga capaiannya adalah 80,64% dengan kategori "**Berhasil**".

## 2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Kondisi Awal RPJMD (tahun 2020), Tahun 2021 dan Tahun 2022

Tabel III.48

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 10 dengan kondisi awal, realisasi tahun 2022 dan tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2020)	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023
10	Menurunnya Ketimpangan Pendapatan	1	Gini Ratio	%	0,26	-	0,27	0,31

Realisasi Gini Ratio pada tahun 2023 dengan realiasi sebesar 0,31% mencapai kategori Berhasil dengan nilai sebesar 80,64%. Hal ini menunjukkan di Kabupaten Sintang masih terdapat kesenjangan yang makin membesar ketidakmerataan pendapatan yang semakin tinggi dari tahun 2022 yang sebsar 0,27%.



### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Tabel III. 49

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 10 dengan Target Akhir RPJMD

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Akhir RPJMD 2026	Realisasi Tahun 2023	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	7	8
1	Menurunnya Ketimpangan Pendapatan	1 Gini Ratio	%	0,24	0,31	80,64

Realisasi indikator Gini Ratio Tahun 2023 dibandingkan dengan kondisi akhir indikator kinerja di dalam RPJMD sebesar 0,24% belum mencapai target akhir. Hal ini menunjukkan bahwa indikator Gini Ratio di Kabupaten Sintang belum mencapai target akhir dengan kategori Berhasil dengan realisasi kinerja sebesar 80,64%.

### 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional

Tabel III.50

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 10 dengan Target Nasional

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Nasional 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	7	8
1	Menurunnya Ketimpangan Pendapatan	1 Gini Ratio	%	0,375-0,378	0,31	83

Realisasi Gini Ratio Tahun 2023 dibandingkan dengan target nasional berdasarkan Ringkasan Nasional Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 sebesar 0,375-0,378 dengan realisasi kinerja indikator untuk Kabupaten Sintang sebesar 0,31 sudah tergolong baik dengan



kategori Berhasil.

## 5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

### 1) Gini Ratio

Realisasi indikator kinerja Gini Ratio apabila dibandingkan dengan kondisi awal belum mampu mempertahankan kinerja pada tahun-tahun sebelumnya dan dibandingkan dengan target mencapai kategori berhasil yaitu mencapai 80,64%. Keadaan ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti :

- Seringnya kenaikan harga kebutuhan pokok
- Tingkat Kemiskinan
- Indeks Pembangunan Manusia
- Tingkat Pengangguran Terbuka, dan
- Kebijakan fiskal

## 6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel III. 51

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Indikator Kinerja Utama	Program/ Kegiatan	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7
1	Gini Ratio	238.865.000,00	231.639.100,00	96,97		
	Program Pemberdayaan Sosial					
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	436.569.600,00	422.759.600,00	96,84		
	<b>RATA-RATA</b>	675.434.600,00	654.398.700,00	96,90	80,64	0



Realisasi Anggaran Indikator Gini Ratio Daerah mencapai 96,90% dengan realisasi kinerja sebesar 80,64%. Hal ini menunjukkan bahwa, realisasi kinerja indikator Tingkat Inflasi Daerah untuk Kabupaten Sintang belum tergolong baik dan efisien dengan kategori Berhasil.

## 7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

### 1) Gini Ratio

Gini ratio diperoleh dari adanya perbandingan ketimpangan pendapatan antar kelas masyarakat yang kaya dan miskin berdasarkan pengeluaran per kapita. Sepanjang tahun 2023, ketimpangan pendapatan di Kabupaten Sintang terus meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk mendukung indikator ini, ditunjang oleh beberapa perangkat daerah yang menangani hal tersebut yaitu, Dinas Sosial dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan program/kegiatan sebagai berikut :

- Program Pemberdayaan Sosial
- Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial

## **Sasaran 11: Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah**

Pelaksanaan sasaran ini untuk mencapai misi “Mengoptimalkan Penyediaan Infrastruktur Dasar Guna Pengembangan Potensi Ekonomi dan Sumber Daya Daerah Secara Lestari”.

Kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah” dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut:



## 1. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja

Tabel III.52

### Indikator Pencapaian Sasaran 11

Indikator		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Infrastruktur Wilayah	%	52,5	n/a	0
Capaian Kinerja Sasaran :					

#### 1) Indeks Infrastruktur Wilayah

Indikator Indeks Infrastruktur Wilayah pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 52,5, terealisasi sebesar n/a, sehingga capaiannya adalah 0% dengan kategori “**Tidak Berhasil**”.

## 2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Kondisi Awal RPJMD (tahun 2020), Tahun 2022 dan Tahun 2021

Tabel III.53

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 11 dengan kondisi awal, realisasi tahun 2022 dan tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2020)	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah	1 Indeks Infrastruktur Wilayah	%	50	-	63,18	n/a

Realisasi Indeks Infrastruktur Wilayah pada tahun 2023 tidak dapat terealisasi atau belum dapat dihitung kinerjanya. Hasil kinerja yang belum diketahui nilainya ini masih sedang dalam proses penghitungan oleh perangkat-perangkat daerah terkait.



### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Tabel III. 54

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 11 dengan Target Akhir RPJMD

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Akhir RPJMD 2026	Realisasi Tahun 2023	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	7	8
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah	1 Indeks Infrastruktur Wilayah	%	56,05	n/a	n/a

Realisasi indikator Indeks Infrastruktur Wilayah sementara Tahun 2023 dibandingkan dengan kondisi akhir indikator kinerja di dalam RPJMD belum mencapai target akhir. Hal ini menunjukkan bahwa indikator Indeks Infrastruktur Wilayah di Kabupaten Sintang berkategori Tidak Berhasil.

### 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional

Tabel III. 55

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 11 dengan Target Nasional

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Nasional 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	7	8
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah	1 Indeks Infrastruktur Wilayah	%	-	n/a	n/a

Realisasi Indeks Infrastruktur Wilayah Tahun 2023 dibandingkan dengan target nasional tidak dapat disandingkan, sebab tidak terdapat target yang ditetapkan Nasional perihal Indeks Infrastruktur Wilayah. Walaupun indikator belum mempunyai target nasional, realisasi kinerja





indikator untuk Kabupaten Sintang sementara tergolong dengan kategori Tidak Berhasil karena belum diketahuinya realisasi kinerja tahun 2023.

## 5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

### 1) Indeks Infrastruktur Wilayah

Capaian indikator Indeks Infrastruktur Wilayah sebesar 0% dengan kategori “**Tidak Berhasil**”. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sintang sementara belum berhasil meningkatkan Infrastruktur Wilayah. Capaian kinerja yang belum diketahui hasilnya ini dipengaruhi oleh berbagai faktor sebagai berikut :

- Letak geografis wilayah yang luas dengan medan / kondisi jalan baik darat maupun air yang sulit untuk ditempuh;
- Bencana banjir yang sering melanda wilayah Kabupaten Sintang sehingga menyulitkan untuk pelaksanaan survei atau peninjauan daerah guna mendapatkan data – data yang akurat mengenai pembangunan infrastruktur wilayah;

## 6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel III. 56  
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Indikator Kinerja Utama	Program/ Kegiatan	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7
1	Indeks Infrastruktur Wilayah	98.041.107.395,00	95.521.569.617,00	97,43		
	Program Penyelenggaraan Jalan					
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	966.593.930,00	813.648.778,00	84,18		
	Program Penataan Desa	210.000.000,00	206.922.800,00	98,53		
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	14.875.817.000,00	14.627.430.600,00	98,33		



Indikator Kinerja Utama	Program/ Kegiatan	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	1.582.010.000,00	1.575.493.000,00	99,59		
	Program Pengembangan Permukiman	31.988.942.474,00	31.560.674.400,00	98,66		
	Program Penataan Bangunan Gedung	13.520.244.000,00	12.790.969.718,00	94,61		
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	24.380.840.105,00	23.643.871.985,00	96,98		
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	10.685.270.000,00	10.679.683.634,00	99,95		
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	4.659.700.000,00	4.540.106.277,00	97,43		
	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	1.582.010.000,00	1.575.493.000,00	99,59		
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	418.513.097,00	377.572.376,00	90,22		
	Program Kawasan Permukiman	870.000.000,00	870.000.000,00	100		
	Program Pengelolaan Izin Lokasi	60.381.160,00	56.867.400,00	94,18		
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	21.898.098,00	18.526.900,00	84,61		
	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	5.254.999.114,00	1.410.718.564,00	26,85		
	Program Pengelolaan Izin Membuka tanah	16.311.090,00	16.247.260,00	99,61		
	<b>RATA-RATA</b>	<b>209.134.637.463,00</b>	<b>200.285.796.309,00</b>	<b>85,98</b>	n/a	0

Realisasi Anggaran Indikator Indeks Infrastruktur Wilayah mencapai 85,98% dengan realisasi kinerja sebesar 0%. Hal ini menunjukkan bahwa, realisasi kinerja indikator Indeks Infrastruktur Wilayah untuk Kabupaten Sintang belum tergolong baik dan efisien dengan kategori Tidak Berhasil.



## 7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

### 1) Indeks Infrastruktur Wilayah

Kinerja indikator Indeks Infrastruktur Wilayah sebesar 0% dengan kategori "**Tidak Berhasil**". Indikator ini didukung oleh program dan kebijakan Pemerintah Pusat serta didukung oleh program daerah berupa :

- a) Program Penyelenggaraan Jalan;
- b) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj);
- c) Program Penataan Desa;
- d) Program Pengelolaan Sumber Daya Air;
- e) Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya;
- f) Program Pengembangan Permukiman;
- g) Program Penataan Bangunan Gedung;
- h) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- i) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
- j) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase;
- k) Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya;
- l) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- m) Program Kawasan Permukiman;
- n) Program Pengelolaan Izin Lokasi;
- o) Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;
- p) Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan;
- q) Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah;
- r) Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya;



## Sasaran 12 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Pelaksanaan sasaran ini untuk mencapai misi “Mengoptimalkan Penyediaan Infrastruktur Dasar Guna Pengembangan Potensi Ekonomi dan Sumber Daya Daerah Secara Lestari”.

Kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup” dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut:

### 1. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja

Tabel III.57

Indikator Pencapaian Sasaran 12

Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1. Indeks kualitas lingkungan hidup	Poin	69,15	72,97	105,52
Capaian Kinerja Sasaran : <b>Sangat Berhasil</b>				<b>105,52</b>

Capaian indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 105,52%, sehingga dapat dikategorikan **Sangat Berhasil**. Pada tahun 2023 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ditargetkan sebesar 69,15 Poin, dan terealisasi sebesar 72,97 Poin.

### 2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2020), 2021 dan Tahun 2022

Tabel III.58

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 12 dengan kondisi awal, realisasi tahun 2023, tahun 2022 dan tahun 2021 serta target akhir RPJMD



No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama		Sat	Kondisi Awal (Tahun 2020)	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023
19	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1	Indeks kualitas lingkungan hidup	Poin	-	71,10	74,58	72,97

Dibandingkan dengan kondisi awal indikator kinerja di dalam RPJMD sebesar 0 Poin, realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2023 sebesar 72,97 Poin yang mana belum mampu mempertahankan kinerja tahun sebelumnya sebesar 74,58 Poin dengan nilai penurunan sebesar 1,61 Poin.

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Tabel III. 59  
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 12 dengan Target Akhir RPJMD

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target Akhir RPJMD 2026	Realisasi Tahun 2023	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	7	8	
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1	Indeks kualitas lingkungan hidup	Poin	70,29	72,97	103,8

Realisasi indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2023 dibandingkan dengan kondisi akhir indikator kinerja di dalam RPJMD telah mencapai target akhir. Hal ini menunjukkan bahwa indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Sintang telah mencapai target akhir dengan kategori **Sangat Berhasil**.

### 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional

Tabel III. 60  
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 12 dengan Target Nasional



No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Nasional 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	7	8
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1 Indeks kualitas lingkungan hidup	Poin	69,48	72,97	105

Realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2023 dibandingkan dengan target nasional berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah mencapai target yang ditetapkan. Realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2023 dibandingkan dengan target nasional mencapai 105% yang mana target Nasional sebesar 69,48 Poin telah tercapai 72,97 Poin oleh Kabupaten Sintang dengan kategori **Sangat Berhasil**.

#### 5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2023 sebesar 105,52% berkategori **Sangat Berhasil**. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Sintang tahun 2023 yaitu 72,97 dikategorikan “Baik”, menduduki peringkat ke 3 di Provinsi Kalimantan Barat dan Peringkat 143 di tingkat nasional. Jika dibandingkan dengan IKLH Kabupaten Sintang tahun 2022 yaitu sebesar 74,58, dapat dilihat bahwa terjadi penurunan sebesar 1,61 poin. Hal ini dipengaruhi dengan adanya penurunan pada komponen Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL), sementara pada Indeks Kualitas Udara (IKU) mengalami peningkatan.

Salah satu penyebab menurunnya IKLH, khususnya menurunnya Indeks Kualitas Air (IKA) yang menurun sebesar 5,38 dari 60,00 pada tahun 2022 menjadi 54,62 pada tahun 2023. Hal ini utamanya disebabkan karena adanya masalah teknis pada metode pengambilan sampel air pada tahun 2022, dimana pada tahun 2022



Pemerintah Kabupaten Sintang hanya melakukan pemantauan kualitas air sungai di 5 Lokasi dan yang mewakili perhitungan hanya dari pemantauan semester I karena pada saat pemantauan kualitas air di semester ke II tidak memenuhi parameter yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Sedangkan pada tahun 2023, pengambilan sampel air dilakukan pada 10 lokasi sehingga dikategorikan telah dapat mewakili kondisi kualitas air di Kabupaten Sintang dan parameter yang diukur/diuji juga sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengambilan sampel air pada tahun 2023 telah mewakili kondisi di musim hujan dan musim kemarau dan lebih akurat hasilnya.

Selain Indeks Kualitas Air (IKA), penurunan nilai IKLH dipengaruhi juga oleh penurunan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL) yang mengalami penurunan sebesar 0,58 dari tahun 2022 dengan nilai 62,80 dan tahun 2023 sebesar 62,22. Hal ini terjadi karena pada kawasan hutan telah dilakukan penegasan tata batas hutan, dimana kondisi hutan di Kabupaten Sintang telah mengalami pengurangan luasan hutan dari luasan hutan indikatif pada tahun sebelumnya.

Adapun solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan nilai IKLH Kabupaten Sintang khususnya terkait Indeks Kualitas Air (IKA) antara lain dengan menetapkan titik-titik pengambilan sampel di 10 lokasi sebagaimana yang telah dilakukan pada tahun 2023 yang dikategorikan telah mewakili kondisi kualitas air di Kabupaten Sintang dan melakukan pengukuran/pengujian parameter sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Disamping itu juga telah dilakukan pengawasan terhadap perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan



yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan kemampuan atau ketersediaan anggaran untuk melaksanakan pengawasan. Pengawasan yang dilakukan meliputi berbagai aspek, termasuk pengolahan limbah cair yang dibuang ke badan sungai dan berpotensi mencemari air sungai.

Berkenaan dengan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL), pada tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang juga telah mengusulkan Lokasi Rimba/Gupung yang berada pada APL (Areal Penggunaan Lain) dan telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sintang dan dikelola oleh kelompok masyarakat, sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Bupati Nomor 122 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Pengusulan dan Penetapan Pengelolaan Rimba/Gupung di Luar Kawasan Hutan oleh Masyarakat di Kabupaten Sintang dengan luas areal sebesar 903,88 Ha guna meningkatkan jumlah luasan tutupan lahan di Kabupaten Sintang.

Upaya lain yang dilakukan adalah terus berupaya mendorong kerja sama dengan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Kapuas dalam melaksanakan pengelolaan daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan yang menjadi kewenangannya dan melakukan rehabilitasi di luar kawasan hutan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sintang termasuk meminta bantuan untuk pengadaan bibit bagi masyarakat.

## 6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel III. 61  
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Indikator Kinerja Utama	Program/ Kegiatan	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7





Indikator Kinerja Utama	Program/ Kegiatan	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67.500.000,00	66.514.800,00	98,54	105,52	
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)					
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	9.000.000,00	5.187.200,00	57,64		
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	22.499.000,00	22.292.770,00	99,08		
	Program Pengelolaan Persampahan	1.249.003.296,00	1.245.468.400,00	99,72		
	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	0	0	0		
	Program Penanggulangan Bencana	454.673.512,00	315.793.094,00	69,45		
	<b>RATA-RATA</b>	<b>1.802.675.808,00</b>	<b>1.655.256.264,00</b>	<b>84,88</b>	<b>105,52</b>	<b>20,64</b>

Realisasi Anggaran Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mencapai 84,88% dengan realisasi kinerja sebesar 105,52%. Hal ini menunjukkan bahwa, realisasi kinerja indicator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup untuk Kabupaten Sintang sudah tergolong baik dan efisien mencapai 20,64% dengan kategori **Sangat Berhasil**.

#### 7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kinerja indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2023 sebesar 105,52% berkategori **Sangat Berhasil**. Keberhasilan ini didukung oleh Program sebagai berikut :



- a. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, yang terdiri dari 3 kegiatan sebagai berikut:
  - 1) Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
  - 2) Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota.
  - 3) Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota.
- b. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI), yaitu kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota berupa Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) atau taman dan jalur hijau Kota.
- c. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), yaitu kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.
- d. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH, yaitu kegiatan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH.
- e. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, yaitu kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten Kota.
- f. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, yaitu Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.



### **Sasaran 13 : Meningkatnya Transparansi Akuntabilitas dan Tata Kelola Pemerintahan**

Pelaksanaan sasaran ini untuk mencapai misi “Menata dan Mengembangkan Manajemen Pemerintah Daerah yang Sesuai dengan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih”.

Kinerja sasaran “Mewujudkan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah” dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut:

#### **1. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja**

Tabel III.62

Indikator Pencapaian Sasaran 13

Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1. Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	B	B	100
2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Kategori	B	B	100
3. Opini Atas Laporan Keuangan	Kategori	WTP	WTP	100
4. Indeks SPBE	Indeks	1,7	1,89	111
Capaian Kinerja Sasaran : <b>Sangat Berhasil</b>				<b>102,75</b>

##### 1) Indeks Reformasi Birokrasi

Capaian indikator Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 100%, sehingga dapat dikategorikan **Sangat Berhasil**. Pada tahun 2023 Indeks Reformasi Birokrasi ditargetkan dengan nilai B dan terealisasi dengan kategori B.

##### 2) Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Capaian indikator nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah sebesar 100%, sehingga dapat dikategorikan **Sangat Berhasil**. Pada tahun 2023



nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah ditargetkan dengan nilai B dan terealisasi dengan kategori B.

### 3) Opini Atas Laporan Keuangan

Capaian indikator Opini atas Laporan Keuangan sebesar 100%, sehingga dapat dikategorikan **Sangat Berhasil**. Pada tahun 2023 indikator Opini atas Laporan Keuangan ditargetkan WTP dan sudah terealisasi dengan kategori WTP.

### 4) Indeks SPBE

Capaian indikator indeks SPBE sebesar 111%, sehingga dapat dikategorikan **Sangat Berhasil**. Pada tahun 2023 indikator indeks SPBE ditargetkan 1,7 dan terealisasi sebesar 1,89.

## 2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2020), Tahun 2022 dan Tahun 2021

Tabel III.63

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 13 dengan kondisi awal, realisasi tahun 2023, tahun 2022 dan tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2020)	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023
25	Mewujudkan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah	1	Indeks reformasi birokrasi	Kategori	CC	CC	CC	B
		2.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Kategori	CC	CC	CC	B
		3.	Opini atas Laporan Keuangan	Kategori	WTP	WTP	WTP	WTP
		4.	Indeks SPBE	Nilai	1,5	-	1,03	1,89



1) Indeks Reformasi Birokrasi

Dibandingkan dengan kondisi awal indikator kinerja di dalam RPJMD dengan peringkat CC, realisasi Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2023 sudah mampu ditingkatkan sesuai target yaitu kategori B. hal ini menunjukkan adanya perkembangan yang sangat signifikan setelah tahun-tahun sebelumnya belum mencapai target.

2) Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Dibandingkan dengan kondisi awal indikator kinerja di dalam RPJMD dengan peringkat CC, realisasi nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah pada tahun 2023 sudah mampu ditingkatkan sesuai target yaitu kategori B. hal ini menunjukkan adanya korelasi antara Indeks Reformasi Birokrasi dengan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.

3) Opini Atas Laporan Keuangan

Dibandingkan dengan kondisi awal RPJMD dengan kategori WTP, indikator Opini atas Laporan Keuangan pada tahun 2023 mampu dipertahankan dengan tahun-tahun sebelumnya.

4) Indeks SPBE

Dibandingkan dengan kondisi awal RPJMD dengan nilai 1,5, indikator indeks SPBE pada tahun 2023 mengalami peningkatan kinerja sebesar 3,9 dengan realisasi 1,89 dan semakin meningkat dari realisasi pada tahun 2022 dan 2021.

**3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir Jangka Menengah Daerah (RPJMD)**



Tabel III. 64

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 13 dengan Target Akhir  
RPJMD

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Akhir RPJMD 2026	Realisasi Tahun 2023	Capaian Kinerja (%)	
1	2	3	4	5	7	8	
1	Mewujudkan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah	1	Indeks reformasi birokrasi	Kategori	A	B	80
		2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Kategori	A	B	80
		3	Opini atas Laporan Keuangan	Kategori	WTP	WTP	100
		4	Indeks SPBE	Nilai	2	1,8	90

Realisasi indikator Indeks Reformasi Birokrasi, Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Indeks SPBE pada tahun 2023 dibandingkan dengan kondisi akhir indikator kinerja di dalam RPJMD belum mencapai target akhir, hanya indikator Opini Atas Laporan Keuangan yang telah mencapai target akhir RPJMD. Hal ini menunjukkan bahwa hanya indikator Opini Atas Laporan Keuangan di Kabupaten Sintang telah mencapai target akhir dengan kategori **Sangat Berhasil**.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional

Tabel III.65

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 13 dengan Target Nasional

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Nasional 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Kinerja (%)	
1	2	3	4	5	7	8	
1	Mewujudkan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah	1	Indeks reformasi birokrasi	Kategori	-	B	0
		2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Kategori	-	B	0



No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Nasional 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Kinerja (%)
		3 Opini atas Laporan Keuangan	Kategori	-	WTP	0
		4 Indeks SPBE	Nilai	-	1,8	0

Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi, Nilai Akuntabilitas Kinerja, Opini Atas Laporan Keuangan dan Indeks SPBE Tahun 2023 dibandingkan dengan target nasional tidak dapat disandingkan, sebab tidak terdapat target yang ditetapkan Nasional perihal terkait semua indikator tersebut. Walaupun indikator belum mempunyai target nasional, realisasi kinerja indikator untuk Kabupaten Sintang sudah tergolong baik dengan kategori Sangat Berhasil untuk semua indikator di atas.

## 5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

### 1. Indeks Reformasi Birokrasi

Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2023 dibandingkan dengan target mencapai nilai yang **Sangat Berhasil** yaitu 100%. Nilai ini mengindikasikan adanya keberhasilan dan komitmen Pemerintah Kabupaten Sintang untuk mencapai target pada tahun 2023 dengan peringkat B. Salah satu upaya keberhasilan yang dilakukan adalah dengan adanya perubahan aturan terbaru yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024. Dengan adanya perubahan aturan ini, Road Map Reformasi Birokrasi menjadi lebih sederhana dan indikator telah ditentukan dalam aturan yang berupa Tema General dan Tema Tematik. Oleh karena itu, dalam penyusunan Road Map Kabupaten Tim yang terdiri



dari Bagian Organisasi, Inspektorat, BAPPEDA dan BKPSDM menjadi lebih terarah dan mudah untuk diukur berdasarkan indikator baru.

## 2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Realisasi nilai akuntabilitas kinerja daerah pada tahun 2023 dibandingkan dengan target mencapai nilai yang **Sangat Berhasil** yaitu 100%. Nilai ini mengindikasikan adanya keberhasilan dan komitmen Pemerintah Kabupaten Sintang untuk mencapai target pada tahun 2023 dengan peringkat B. Salah satu upaya keberhasilan yang dilakukan adalah dengan menyurati Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk melaksanakan asistensi secara tatap muka yang diikuti oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Inspektorat Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Bagian Organisasi di Jakarta. Hasil dari pertemuan ini sangat membantu Tim Kabupaten dalam memperbaiki baik dokumen perencanaan maupun dokumen kinerja sesuai dengan arahan Tim Asistensi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

## 3. Opini Atas Laporan Keuangan

Realisasi Opini Atas Laporan Keuangan pada tahun 2023 dibandingkan dengan capaian target berkategori sangat berhasil yaitu 100%. Tahun 2023 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang menetapkan Perjanjian Kinerja dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari kedua indikator di atas realisasinya telah sesuai dengan target yang ditentukan. Adapun yang menjadi faktor penunjang dari keberhasilan tersebut adalah:

### a. Penetapan APBD Kabupaten Sintang

Proses penetapan APBD melalui tahapan sebagai berikut:

#### 1) **Penyampaian dan Pembahasan Raperda tentang APBD**





Menurut ketentuan Permendagri No. 77 Tahun 2020, Raperda beserta lampiran-lampirannya yang telah disusun dan disosialisasikan kepada masyarakat untuk selanjutnya disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama. Pengambilan keputusan bersama ini harus sudah terlaksana paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dimulai.

Atas dasar persetujuan bersama tersebut, kepala daerah menyiapkan rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD yang harus disertai dengan nota keuangan. Raperda APBD tersebut antara lain memuat rencana pengeluaran yang telah disepakati bersama. Raperda APBD ini baru dapat dilaksanakan oleh pemerintahan kabupaten/kota setelah mendapat pengesahan dari Gubernur terkait. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh hari) setelah penyampaian Raperda APBD Gubernur tidak mengesahkan raperda tersebut, maka kepala daerah (Bupati/Walikota) berhak menetapkan Raperda tersebut menjadi Peraturan Kepala Daerah. Nota keuangan dan pengesahan dari Gubernur terlampir.

## **2) Evaluasi Raperda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD**

Raperda APBD pemerintahan kabupaten/kota yang telah disetujui dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota harus disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja. Evaluasi ini bertujuan demi tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur, serta untuk meneliti sejauh mana APBD kabupaten/kota tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau peraturan daerah lainnya. Hasil



evaluasi ini sudah harus dituangkan dalam keputusan gubernur dan disampaikan kepada bupati/walikota paling lama 15 (lima belas ) hari kerja terhitung sejak diterimanya Raperda APBD tersebut.

### **3) Penetapan Perda tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD**

Tahapan terakhir adalah menetapkan raperda APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi tersebut menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Setelah itu Perda dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD ini disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur terkait paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal ditetapkan.

#### **b. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah**

Dalam hal ini BPKAD Kabupaten Sintang pada tahun ini mempunyai target mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI perwakilan Kalimantan Barat, setelah tahun 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

#### **4. Indeks SPBE**

Realisasi indeks SPBE pada tahun 2023 dibandingkan dengan capaian target berkategori **Sangat Berhasil** yaitu 111%. Turunnya indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Sintang menjadi sebesar 1,03 untuk tahun 2022 yang sebelumnya pada tahun 2021 sebesar 1,51 disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut :

- Pada tahun 2021, pelaksanaan Evaluasi SPBE telah dilaksanakan dengan menggunakan instrumen yang telah disesuaikan, dari yang sebelumnya 35 indikator menjadi 47 indikator, dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun



2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Penyesuaian atas instrumen dilakukan untuk memastikan peningkatan kualitas SPBE dapat tercapai sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dengan diterapkannya instrumen baru ini tentunya terdapat penyesuaian dalam penilaian yang berdampak pada penurunan nilai indeks SPBE di hampir seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah terutama pada indikator-indikator baru yang dinilai pada tahun ini. Namun hal ini ditargetkan untuk memenuhi cakupan yang lebih komprehensif, dimana hasil penilaian tahun ini merepresentasikan indeks penerapan SPBE dengan kualitas yang lebih optimal.

Penurunan indeks dari tahun sebelumnya ini disebabkan dengan adanya penambahan penerapan Indikator Baru pada Aspek Audit TIK (Tata Kelola SPBE) dan Manajemen SPBE.

- Selain dikarenakan bertambahnya indikator penilaian dari 35 indikator menjadi 47 indikator, hal lain yang menjadi penyebab turunnya indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Sintang adalah masih kurangnya SDM yang menangani SPBE, serta kurangnya kompetensi pegawai. Untuk mengatasi masalah tersebut, harus adanya upaya mengembangkan kompetensi pegawai melalui pelatihan kemampuan serta pendampingan dari Kementerian PANRB. Pendampingan dan asistensi dari Kementerian PANRB, dapat mempercepat implementasi SPBE dan menaikkan indeks SPBE meningkatkan pelayanan publik yang lebih profesional dan cepat.
- Penurunan indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Sintang tahun 2022 juga disebabkan pada tahun tersebut Pemerintah Kabupaten Sintang belum melaksanakan penyusunan Arsitektur dan Perencanaan SPBE Pemerintah Daerah sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur



Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional. Penyusunan Arsitektur dan Perencanaan SPBE Pemerintah Kabupaten Sintang baru dilaksanakan pada tahun 2023 penyusunan untuk tahun periode 2024 s.d. 2028. Penyusunan Arsitektur dan Perencanaan SPBE dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sintang bekerjasama dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya. Hasil dari penyusunan arsitektur dan perencanaan SPBE ini antara lain:

- i. Kondisi Eksisting dan Analisis Gap Arsitektur SPBE Kab Sintang;
- ii. Arsitektur Proses Bisnis dan SOP SPBE Kabupaten Sintang;
- iii. Arsitektur Data dan Informasi, dan Layanan SPBE Kabupaten Sintang;
- iv. Arsitektur Aplikasi SPBE Kabupaten Sintang;
- v. Arsitektur Infrastruktur SPBE Kabupaten Sintang;
- vi. Arsitektur Keamanan SPBE Kabupaten Sintang;
- vii. Arsitektur Tatakelola Manajemen SPBE dan Penyelenggara SPBE Kabupaten Sintang;
- viii. Peta Rencana SPBE dan Perkiraan Biaya Kabupaten Sintang;
- ix. Executive Summary;
- x. Peningkatan indeks SPBE Tahun 2023 menjadi 1,89 dikarenakan pada tahun 2023 telah dilakukan pemetaan dan evaluasi terhadap penilaian pemenuhan indikator SPBE.

## **6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Tabel III. 66  
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya



Indikator Kinerja Utama	Program/ Kegiatan	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7
1	Opini atas Laporan Keuangan	484.855.691.025,00	141.037.150.645,00	29,09	102,75	
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah					
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.755.712.118,00	1.741.321.733,00	99,18		
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	637.527.070,00	634.018.471,00	99,45		
	Program Kepegawaian Daerah	2.043.904.464,00	1.964.477.379,00	96,11		
	Program Pengelolaan Arsip	180.000.000,00	160.255.678,00	89,03		
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.823.930.210,00	2.801.503.381,00	99,21		
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	16.108.927.137,00	15.936.240.363,00	98,93		
	Indeks SPBE	1.570.968.874,00	1.548.976.090,00	98,60		
	Program Pengelolaan Aplikasi Dan Informatika					
	<b>RATA-RATA</b>	<b>509.976.660.898,00</b>	<b>165.823.943.740,00</b>	<b>88,70</b>	<b>102,75</b>	<b>14,05</b>

Realisasi Anggaran sasaran Meningkatnya Transparansi, Akuntabilitas dan Tata Kelola Pemerintahan mencapai 88,70% dengan realisasi kinerja sebesar 102,75%. Hal ini menunjukkan bahwa, realisasi kinerja sasaran Meningkatnya Transparansi, Akuntabilitas dan Tata Kelola Pemerintahan untuk Kabupaten Sintang sudah tergolong baik dan efisien mencapai 14,05% dengan kategori Sangat Berhasil.

## 7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

### 1. Indeks Reformasi Birokrasi



Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sintang sudah mencapai target yang telah ditetapkan dengan kategori **Sangat Berhasil**. Perubahan aturan menjadi kunci keberhasilan pencapaian target dan Kerjasama serta koordinasi yang baik antara Tim Kabupaten dengan Perangkat Daerah pemangku tema dalam Road Map. Keberhasilan ini didukung oleh kegiatan yang diemban oleh Bagian Organisasi dan Inspektorat Kabupaten, yaitu Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi.

## 2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah di Kabupaten Sintang sudah memenuhi target yang diharapkan. Hal ini disebabkan sebagian besar terdapat konsisten dan sinkronisasi antar dokumen sistem akuntabilitas kinerja daerah. Selain itu, belum maksimalnya sosialisasi dan fasilitasi serta asistensi kepada sebagian perangkat daerah dalam hal menyusun dokumen sesuai ketentuan serta minimnya dukungan terhadap kegiatan sebagai berikut :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Pendampingan dan Asistensi

## 3. Opini Atas Laporan Keuangan

Rasio perda yang ditetapkan di Kabupaten Sintang apabila dibandingkan antara target dan realisasi dapat dikategorikan Sangat Berhasil. Hal ini disebabkan karena keberhasilan terhadap jumlah pengajuan peraturan dengan jumlah peraturan yang ditetapkan



melalui kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang.

Program Pendukung

- a. Program Informasi Dan Komunikasi Publik
- b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program pendukung merupakan program yang menjadi faktor terlaksananya kegiatan di sekretariat, adapun program/kegiatan pendukung terserap 93% sehingga program/kegiatan dapat berjalan dengan baik.

Program Utama

- a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program utama merupakan *core business* atau factor utama pendukung terlaksananya tujuan utama organisasi. Adapun realisasi capaian program/kegiatan terserap 99% sehingga target penyusunan APBD tepat waktu dan opini WTP dari BPK terhadap laporan Keuangan Daerah dapat tercapai 100%.

#### 4. Indeks SPBE

Indeks SPBE di Kabupaten Sintang apabila dibandingkan antara target dan realisasi dapat dikategorikan **Sangat Berhasil**. Hal ini disebabkan karena adanya berbagai kemajuan terhadap tata kelola teknologi dan informatika oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang melalui Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik terdiri dari 2 (dua) yaitu kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

- a. Program Aplikasi Informatika terdiri dari 2 kegiatan yaitu :



- Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
  - Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral yaitu kegiatan Penyelenggara Statistik Sektoral di Lingkungan Kabupaten/Kota.
- c. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi yaitu kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

## B. Realisasi Anggaran

### 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Penjelasan

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2023 yang disajikan dalam laporan ini merupakan laporan realisasi setelah perubahan anggaran, dengan rincian sebagai berikut:

#### a. Pendapatan/Penerimaan Keadaan 31 Desember 2023

Tabel III. 67

#### Realisasi Pendapatan/Penerimaan

No.	Jenis penerimaan	Jumlah Setelah Perubahan
1.	Pendapatan Asli Daerah	172.769.624.251,93
2.	Pendapatan Transfer	1.859.337.071.878,20
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	4.500.000.000,00
JUMLAH		2.036.606.696.130,00

Sumber : BPKAD Kabupaten Sintang 2024

#### Analisis Anggaran dan Realisasi Pendapatan/Penerimaan

Pendapatan tahun 2023 sebesar Rp. 2.036.606.696.130,00 terdapat peningkatan sebesar Rp. 242.732.052.507,00 jika dibandingkan realisasi pendapatan mulai tahun 2022 yaitu Rp. 1.793.874.643.623,00.





**b. Belanja Keadaan 31 Desember 2023**

Tabel III. 68

**Belanja Daerah**

No.	Jenis Belanja	Jumlah Setelah Perubahan
1.	Belanja Operasi	1.374.524.123.002
2.	Belanja Modal	307.221.770.188
3.	Belanja Transfer	471.961.993.328
4.	Belanja Tak Terduga	8.398.710.770
JUMLAH BELANJA DAERAH		2.162.106.597.288

Sumber : BPKAD Kabupaten Sintang 2024

**c. Analisis Anggaran dan Realisasi Belanja**

Belanja daerah tahun 2023 yaitu sebesar Rp 1.949.523.340.016,71 atau terealisasi 90,17% dari Jumlah yang sebesar Rp. 2.162.106.597.288,00 dengan sisa anggaran belanja daerah sebesar Rp. 212.583.257.271,29.

**2. Realisasi Belanja Sasaran Strategis**

Untuk mewujudkan target kinerja sasaran strategis, alokasi anggaran tiap program yang dilaksanakan sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023, target dan realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel III. 69  
Realisasi Belanja Program Prioritas Daerah

NO	PROGRAM YANG DILAKSANAKAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	CAPAIAN KINERJA (%)	
1	2	3	4	5	6	
<b>1</b>	<b>SASARAN : MENINGKATNYA KUALITAS PENDIDIKAN MASYARAKAT</b>					
1)	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	211.569.325.023,00	152.271.291.080,00	71,97		
<b>RATA-RATA</b>				<b>71,97</b>	<b>100,67</b>	
<b>2</b>	<b>SASARAN : MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT</b>					
1)	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	67.500.000,00	66.867.174,00	99,06		
2)	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	373.745.800,00	373.745.800,00	94,31		
3)	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	156.354.600,00	155.884.625,00	99,70		
4)	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	20.000.000,00	19.945.000,00	99,72		
5)	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	94.644.000,00	94.495.000,00	99,84		
6)	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	341.633.600,00	328.709.137,00	96,22		
7)	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	4.935.237.300,00	4.612.326.013,00	93,46		
8)	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	6.176.999.750,00	6.067.865.598,00	98,23		
9)	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	339.549.580,00	336.829.400,00	99,20		
10)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	78.283.677.182,00	67.715.507.188,00	86,50		
11)	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	6.967.552.000,00	3.639.436.078,00	52,23		
12)	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	346.002.000,00	225.919.730,00	65,29		
13)	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	801.125.800,00	690.804.010,00	86,23		
<b>RATA-RATA</b>				<b>91,45</b>	<b>102,4</b>	
<b>3</b>	<b>SASARAN : MENINGKATNYA DAYA BELI MASYARAKAT</b>					
1)	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	35.122.800,00	34.122.200,00	97,15		
2)	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	63.199.000,00	63.199.000,00	100		
3)	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.846.342.000,00	1.813.630.964,00	98,23		
<b>RATA-RATA</b>				<b>98,56</b>	<b>106,2</b>	
<b>4</b>	<b>SASARAN : MENINGKATNYA KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA</b>					
1)	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	928.450.000,00	923.643.108,00	99,48		
2)	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	64.901.000,00	63.433.400,00	97,74		
3)	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	630.034.720,00	625.434.630,00	99,27		
4)	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	33.173.867.103,00	33.165.038.882,00	99,97		



NO	PROGRAM YANG DILAKSANAKAN		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	CAPAIAN KINERJA (%)
1	2		3	4	5	6
	5)	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	49.959.000,00	49.861.400,00	99,80	
	<b>RATA-RATA</b>				<b>99,25</b>	<b>100</b>
<b>5</b>	<b>SASARAN : MENINGKATNYA PERTUMBUHAN EKONOMI</b>					
	1)	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	75.115.350,00	74.922.250,00	99,74	
	2)	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	71.509.000,00	71.241.400,00	99,63	
	3)	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	313.810.270,00	288.662.425,00	91,99	
	4)	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	489.457.512,00	462.101.462,00	94,41	
	5)	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	65.612.000,00	65.210.800,00	99,39	
	6)	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	199.999.880,00	199.042.019,00	99,52	
	7)	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	47.645.800,00	47.247.840,00	99,16	
	8)	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI	9.900.000,00	9.750.000,00	98,48	
	9)	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	17.966.800,00	16.892.600,00	94,02	
	10)	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1.277.286.707,00	1.246.303.500,00	97,57	
	11)	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	400.000.000,00	399.364.000,00	99,84	
	12)	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	4.805.557.370,00	4.798.736.344,00	99,86	
	13)	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	31.929.500,00	31.814.500,00	99,64	
	14)	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP / USP KOPERASI	20.861.400,00	20.303.941,00	97,33	
	<b>RATA-RATA</b>				<b>97,93</b>	<b>110,11</b>
<b>6</b>	<b>SASARAN : MENURUNNYA ANGKA KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN</b>					
	1)	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	15.000.000,00	13.880.800,00	92,54	
	2)	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	688.182.400,00	680.224.856,00	98,84	
	3)	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	134.792.100,00	118.486.925,00	87,90	
	4)	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	348.041.800,00	346.593.400,00	99,58	
	5)	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	238.865.000,00	231.639.100,00	96,97	
	<b>RATA-RATA</b>				<b>95,16</b>	<b>126,71</b>
<b>7</b>	<b>SASARAN : MENINGKATNYA JUMLAH DESA MANDIRI</b>					
	1)	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.057.114.820,00	1.045.381.805,00	98,89	
	<b>RATA-RATA</b>				<b>98,89</b>	<b>111,88</b>
<b>8</b>	<b>SASARAN : MENINGKATNYA KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN DAN PERKEBUNAN TERHADAP PDRB</b>					
	1)	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	4.805.557.370,00	4.798.736.344,00	99,86	
	<b>RATA-RATA</b>				<b>99,86</b>	<b>79,72</b>
<b>9</b>	<b>SASARAN : TERJAGANYA STABILITAS PEREKONOMIAN DAERAH</b>					
	1)	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1.740.847.425,00	1.734.473.320,00	99,63	
	2)	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	337.325.150,00	336.973.080,00	99,90	
	3)	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	193.383.150,00	192.089.150,00	99,33	
	4)	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	17.156.000,00	16.739.800,00	97,57	
	5)	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	232.320.500,00	230.724.542,00	99,31	
	<b>RATA-RATA</b>				<b>99,14</b>	<b>154,09</b>
<b>10</b>	<b>SASARAN : MENURUNNYA KETIMPANGAN PENDAPATAN</b>					
	1)	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	238.865.000,00	231.639.100,00	96,97	



NO	PROGRAM YANG DILAKSANAKAN		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	CAPAIAN KINERJA (%)
1	2		3	4	5	6
	2)	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	436.569.600,00	422.759.600,00	96,84	
	<b>RATA-RATA</b>				<b>96,90</b>	<b>80,64</b>
<b>11</b>	<b>SASARAN : MENINGKATNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR WILAYAH</b>					
	1)	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	98.041.107.395,00	95.521.569.617,00	97,43	
	2)	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	966.593.930,00	813.648.778,00	84,18	
	3)	PROGRAM PENATAAN DESA	210.000.000,00	206.922.800,00	98,53	
	4)	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	14.875.817.000,00	14.627.430.600,00	98,33	
	5)	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	1.582.010.000,00	1.575.493.000,00	99,59	
	6)	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	31.988.942.474,00	31.560.674.400,00	98,66	
	7)	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	13.520.244.000,00	12.790.969.718,00	94,61	
	8)	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	24.380.840.105,00	23.643.871.985,00	96,98	
	9)	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	10.685.270.000,00	10.679.683.634,00	99,95	
	10)	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	4.659.700.000,00	4.540.106.277,00	97,43	
	11)	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	1.582.010.000,00	1.575.493.000,00	99,59	
	12)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	418.513.097,00	377.572.376,00	90,22	
	13)	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	870.000.000,00	870.000.000,00	100	
	14)	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	60.381.160,00	56.867.400,00	94,18	
	15)	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	21.898.098,00	18.526.900,00	84,61	
	16)	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	5.254.999.114,00	1.410.718.564,00	26,85	
	17)	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKATANAH	16.311.090,00	16.247.260,00	99,61	
	18)	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	1.582.010.000,00	1.575.493.000,00	99,59	
	<b>RATA-RATA</b>				<b>85,98</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>SASARAN : MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP</b>					
	1)	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	67.500.000,00	66.514.800,00	98,54	
	2)	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	9.000.000,00	5.187.200,00	57,64	
	3)	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	22.499.000,00	22.292.770,00	99,08	
	4)	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1.249.003.296,00	1.245.468.400,00	99,72	
	5)	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	0	0	0	
	6)	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	557.251.812,00	390.516.994,00	70,08	
	<b>RATA-RATA</b>				<b>84,88</b>	<b>107,37</b>
<b>13</b>	<b>SASARAN : MENINGKATNYA TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN</b>					
	1)	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	484.855.691.025,00	141.037.648.971,00	29,09	
	2)	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.755.712.118,00	1.741.321.733,00	99,18	
	3)	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	637.527.070,00	634.018.471,00	99,45	
	4)	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.043.904.464,00	1.964.477.379,00	96,11	
	5)	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	180.000.000,00	160.255.678,00	89,03	
	6)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2.823.930.210,00	2.801.503.381,00	99,21	
	7)	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	16.108.927.137,00	15.936.240.363,00	98,93	



NO	PROGRAM YANG DILAKSANAKAN		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	CAPAIAN KINERJA (%)	
1	2		3	4	5	6	
	8)	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI DAN INFORMATIKA	1.686.409.170,00	1.608.673.664,00	95,39		
<b>RATA-RATA</b>					<b>88,70</b>	<b>102,75</b>	
<b>JUMLAH RATA-RATA KESELURUHAN</b>					<b>94,55</b>	<b>98,73</b>	

Efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja di ukur melalui selisih persentase capaian kinerja maksimal 100% dikurang persentase realisasi belanja pendukung kinerja. Berdasarkan pengukuran yang dilakukan, maka tingkat efisiensi penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja sebagai berikut :

No	Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
1	Rata-rata capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2023	98,73%	94,55%	4,18

Terlihat bahwa rata-rata sasaran kinerja Pemerintah Kabupaten Sintang menunjukkan pencapaian 98,73%, sedangkan realisasi anggaran terserap sebanyak 94,55% dari total anggaran yang dialokasikan. Sasaran yang berhasil dicapai dengan belanja dibawah capaian kinerja menunjukkan telah tercapainya efisiensi anggaran sebesar 4,18%, Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.



---

## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kabupaten Sintang tahun 2023 merupakan Laporan kinerja terakhir dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang tahun 2021-2026.

Dalam tahun ini, Pemerintah Kabupaten Sintang telah berupaya untuk mewujudkan pencapaian kinerja yang optimal sesuai dengan sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditargetkan, namun dalam pelaksanaannya tidak semua target capaian sasaran strategis, masuk dalam kategori sangat berhasil. Hasil analisis pencapaian pengukuran kinerja terhadap 13 Sasaran Strategis dan 18 Indikator Kinerja Utama diketahui bahwa 15 Indikator Kinerja Utama berkategori “Sangat Berhasil”, 2 Indikator Kinerja Utama berkategori “Berhasil”, dan 1 Indikator Kinerja Utama berkategori “Tidak Berhasil”.

Bertolak dari masih adanya kendala dan hambatan dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan seperti telah dijelaskan pada Bab III, maka Pemerintah Kabupaten Sintang berupaya untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang, dengan melakukan langkah-langkah berikut ini :

1. Mempercepat proses pembangunan Kabupaten Sintang melalui pendekatan pembangunan yang lebih komprehensif seperti aspek prosperity, security, hukum dan sampai pada aspek politik yang bermuara pada pembangunan karakter bangsa (*Character Nation Building*).
2. Menggerakkan faktor dukungan Pemerintah Daerah dari masyarakat dalam mewujudkan kondisi kondusif bagi pembangunan, sebagai implementasi dan faktor dinamika otonomi “Dukungan Lokal”, sehingga lahir kesepakatan dalam kebersamaan.



3. Menggerakkan serta mengoptimalkan pemberdayaan sumber daya pembangunan daerah berkelanjutan, sebagai implementasi dari faktor dinamika otonomi “*Manajemen Skill*”, sehingga lahir kesamaan visi dan misi serta keselarasan tujuan pembangunan antara aparat pemerintah, pelaku bisnis dan masyarakat.
4. Mengoptimalkan pembangunan dan penyediaan informasi dalam rangka mendorong peningkatan investasi dalam bentuk kerjasama bilateral, sebagai implementasi faktor kunci dinamika otonomi “Kemampuan dalam pengelolaan dan penyediaan informasi potensi”, sehingga lahir jejaring kerja yang luas dan berdaya jangkau global.
5. Mempercepat pembangunan di wilayah-wilayah tertinggal di Kabupaten Sintang. Program aksinya melalui program inti yang meliputi penataan ruang, penataan infrastruktur dan pembenahan institusi kelembagaan serta program strategis berbagai kegiatan pembangunan, baik ekonomi, sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan.
6. Lebih fokus pada penetapan penggerak utama (*prime mover*) pembangunan daerah yang terdiri dari :
  - a. Membangun wilayah dari pinggiran;
  - b. Penataan dan pemekaran wilayah;
  - c. Aksesibilitas terhadap sumber daya listrik dan energi lainnya;
  - d. Hilirisasi produk;
  - e. Kegawatdaruratan infrastruktur transportasi; dan
  - f. Tata kelola pemerintahan.
7. Pembangunan berkelanjutan dalam mencapai visi dan misi akan dilaksanakan RPJMD Kabupaten Sintang 2021-2026.



## **PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN SINTANG PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **dr. H. JAROT WINARNO, M.Med.PH**  
Jabatan : **Bupati Sintang**

Berjanji akan mewujudkan kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Sintang, 03 Januari 2023



**BUPATI SINTANG**

**dr. H. JAROT WINARNO, M.Med.PH**



**PERJANJIAN KINERJA  
PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
TAHUN ANGGARAN 2023**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)		Satuan	Target
1	2	3		4	5
1.	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	1.	Rata-rata Lama Sekolah	%	7.29
		2.	Harapan Lama Sekolah	%	12,74
2.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1.	Harapan Hidup Saat Lahir	Tahun	72.31
3.	Meningkatnya daya beli masyarakat	1.	Pengeluaran perkapita	Rupiah/ Bulan	1.315. 950
4.	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	1.	Jumlah Konflik antar pemeluk agama	Kali	0
5.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	1.	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,25
6.	Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran	1.	Persentase penduduk di atas garis kemiskinan	%	92,35
		2.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,5
7.	Meningkatnya Desa mandiri	1.	Persentase Desa mandiri	%	25,83
8.	Meningkatnya Kontribusi sektor Pertanian dan Perkebunan terhadap PDRB	1.	Kontribusi sektor Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB (%)	%	29,59
9.	Terjaganya stabilitas perekonomian daerah	1.	Tingkat Inflasi daerah	%	4,4
10.	Menurunnya ketimpangan pendapatan	1.	Gini Ratio	%	0,25
11.	Meningkatnya kualitas infrastruktur Wilayah	1.	Indeks Infrastruktur Wilayah	%	52,5
12.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	69,15

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)		Satuan	Target
1	2	3		4	5
13.	Meningkatnya transparansi, akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan	1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	B
		2.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Kategori	B
		3.	Opini atas Laporan Keuangan	Kategori	WTP
		4.	Indeks SPBE	Indeks	1.7

### Program Pendukung

### Anggaran

#### Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat

Program Pengelolaan Pendidikan

188.343.686.020,00

#### Sasaran 2 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

67.500.000,00

Program Perlindungan Perempuan

373.745.800,00

Program Peningkatan Kualitas Keluarga

156.354.600,00

Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak

20.000.000,00

Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)

94.644.000,00

Program Perlindungan Khusus Anak

341.633.600,00

Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)

4.935.237.300,00

Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)

5.917.000.000,00

Program Pengendalian Penduduk

360.070.100,00

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

76.513.967.582,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

6.967.552.000,00

Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman

346.002.000,00

Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

790.580.800,00

#### Sasaran 3 : Meningkatkan Daya Beli Masyarakat

Program Penanganan Kerawanan Pangan

35.122.800,00

Program Pengawasan Keamanan Pangan

63.199.000,00

Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

1.846.342.000,00

#### Sasaran 4 : Meningkatkan Kerukunan Antar Umat Beragama

Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

588.300.000,00

Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

64.901.000,00

Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

630.034.720,00

Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

2.656.358.400,00

Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

49.959.000,00

#### Sasaran 5 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

75.115.350,00

Program Promosi Penanaman Modal

71.509.000,00

Program Pelayanan Penanaman Modal

313.810.270,00

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

489.457.512,00

Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

65.612.000,00

Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri

199.999.880,00

Program Pengendalian Izin Usaha Industri

47.645.800,00

Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri

15.000.000,00

Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	30.000.000,00
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.285.120.207,00
Program Pemasaran Pariwisata	400.000.000,00
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	4.385.557.375,00
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	31.929.500,00
Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	35.000.000,00
<b>Sasaran 6 : Menurunnya Angka Kemiskinan Dan Pengangguran</b>	
Program Perencanaan Tenaga Kerja	15.000.000,00
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	688.182.400,00
Program Penempatan Tenaga Kerja	134.792.100,00
Program Hubungan Industrial	231.049.800,00
Program Pemberdayaan Sosial	116.662.000,00
<b>Sasaran 7 : Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri</b>	
Program Administrasi Pemerintahan Desa	682.063.800,00
<b>Sasaran 8 : Meningkatnya Kontribusi sektor Pertanian dan Perkebunan terhadap PDRB</b>	
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	4.125.557.400,00
<b>Sasaran 9 : Terjaganya Stabilitas Perekonomian Daerah</b>	
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.158.648.476,00
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	275.488.150,00
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	193.383.150,00
Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	17.156.000,00
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	175.540.500,00
<b>Sasaran 10 : Menurunnya Ketimpangan Pendapatan</b>	
Program Pemberdayaan Sosial	116.662.000,00
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	111.576.600,00
<b>Sasaran 11 : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah</b>	
Program Penyelenggaraan Jalan	98.271.243.208,00
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	916.593.930,00
Program Penataan Desa	210.000.000,00
Program Pengelolaan Sumber Daya Air	11.024.992.000,00
Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	1.577.010.000,00
Program Pengembangan Permukiman	25.443.580.000,00
Program Penataan Bangunan Gedung	13.003.370.000,00
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	23.711.918.000,00
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	8.921.270.000,00
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	4.596.950.000,00
Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	1.577.010.000,00
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	343.513.284,00
Program Kawasan Permukiman	720.000.000,00
Program Pengelolaan Izin Lokasi	60.381.160,00
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	34.999.498,00
Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	4.684.999.258,00
Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	16.311.090,00
Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	1.577.010.000,00
<b>Sasaran 12 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup</b>	
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	67.500.000,00
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	9.000.000,00
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	22.499.000,00
Program Pengelolaan Persampahan	1.049.003.296,00
Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	200.000.000
Program Penanggulangan Bencana	276.337.712,00
<b>Sasaran 13 : Meningkatnya transparansi, akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan</b>	
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	476.283.307.089,00
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.755.712.118,00
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	635.902.480,00

Program Kepegawaian Daerah	1.701.195.878,00
Program Pengelolaan Arsip	180.000.000,00
Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.730.583.478,00
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	14.777.033.525,00
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1.555.176.374,00

## Lampiran II

### PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TAHUN 2023			CAPAIAN KINERJA SASARAN	
				TARGET 2023	REALISASI 2023	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	1.	Rata-rata Lama Sekolah	%	7,29	7,64	104,80	100,67
		2.	Harapan Lama Sekolah	%	12,74	12,30	96,55	
2.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1.	Harapan Hidup Saat Lahir	Tahun	72,31	74,07	102,4	102,4
3.	Meningkatnya daya beli masyarakat	1.	Pengeluaran perkapita	Rupiah/ Bulan	1.315.960	1.397.653	106,2	106,2
4.	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	1.	Jumlah Konflik antar pemeluk agama	Kali	0	0	100	100
5.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	1.	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,25	4,68	110,11	110,11
6.	Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran	1.	Persentase penduduk di atas garis kemiskinan	%	92,35	91,82	99,43	126,71
		2.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,5	2,92	154	
7.	Meningkatnya Desa mandiri	1.	Persentase Desa mandiri	%	25,83	28,90	111,88	111,88
8.	Meningkatnya Kontribusi sektor Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB	1.	Kontribusi sektor Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB (%)	%	29,59	23,59	79,72	79,72
9.	Terjaganya stabilitas perekonomian daerah	1.	Tingkat Inflasi daerah	%	4,4	2,02	154,09	154,09
10.	Menurunnya ketimpangan pendapatan	1.	Gini Ratio	%	0,25	0,31	80,64	80,84
11.	Meningkatnya kualitas infrastruktur Wilayah	1.	Indeks Infrastruktur Wilayah	%	52,5	n/a	0	0
12.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	67,96	72,97	107,37	107,37
13.	Meningkatnya transparansi, akuntabilitas	1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	B	B	100	102,75

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)		SATUAN	TAHUN 2023			CAPAIAN KINERJA SASARAN
					TARGET 2023	REALISASI 2023	%	
1	2	3		4	5	6	7	8
	dan tata kelola pemerintahan	2.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Kategori	B	B	100	
		3.	Opini atas Laporan Keuangan	Kategori	WTP	WTP	100	
		4.	Indeks SPBE	Indeks	1,7	1,89	111	